



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE TAHUN 2022

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE 2022

Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2022 ini berisikan hasil pengukuran terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2022.

Penilaian ini merupakan pengukuran tingkat kematangan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Instrument ini juga diuraikan lebih terperinci pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Hak Cipta © Kedeputian Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Situs Web: <https://menpan.go.id/>
<https://spbe.go.id/>

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kami dapat menyelesaikan serangkaian proses pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2022 dengan tingkat partisipasi sebanyak 554 (lima ratus lima puluh empat) dari 638 (enam ratus tiga puluh delapan) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemantauan dan Evaluasi SPBE ini bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta peningkatan layanan digital nasional dalam kerangka reformasi birokrasi yang berdampak. Untuk dapat menggambarkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE dimaksud, maka kami Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi SPBE secara nasional yang menghasilkan Indeks SPBE Nasional Tahun 2022.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama dari seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2022, baik secara umum kepada seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan secara khusus bagi Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, serta Tim Asesor Eksternal dari Perguruan Tinggi. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 31 Desember 2022

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana



Nanik Murwati

Daftar isi :

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		v
RINGKASAN EKSEKUTIF		vi
TENTANG SPBE		1
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		1
Tim Koordinasi SPBE Nasional		2
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE		3
Metodologi Pengukuran Tingkat Kematangan SPBE		5
Struktur Penilaian		8
Bobot Penilaian dan Predikat Indeks SPBE		13
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2022		15
Dokumentasi Kegiatan		16
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE TAHUN 2022		17
Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE Instansi Pusat		26
Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah		31
PENUTUP		54
Kesimpulan		54
Saran dan Tindak Lanjut Tahun 2023		57

Daftar Tabel :

Tabel 1.	Indikator Pemantauan dan Evaluasi SPBE	9
Tabel 2.	Bobot Penilaian Indikator	13
Tabel 3.	Predikat indeks SPBE	14
Tabel 4.	Nilai Indeks Domain Nasional	17
Tabel 5.	Nilai Indeks Domain Instansi Pusat	20
Tabel 6.	Nilai Indeks Domain Pemerintah Daerah	22
Tabel 7.	Nilai Indeks Kematangan SPBE	25
Tabel 8.	Indeks SPBE Kementerian	26
Tabel 9.	Indeks SPBE Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)	27
Tabel 10.	Indeks SPBE Alat Negara	29
Tabel 11.	Indeks SPBE Sekretariat Kabinet	29
Tabel 12.	Indeks SPBE Sekretariat Jenderal Lembaga Negara	29
Tabel 13.	Indeks SPBE Instansi Lainnya	29
Tabel 14.	Indeks SPBE Lembaga Penyiaran Publik	29
Tabel 15.	Indeks SPBE Lembaga Nonstruktural (LNS)	30
Tabel 16.	Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Aceh	31
Tabel 17.	Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Sumatera Utara	32
Tabel 18.	Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Riau	33
Tabel 19.	Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Kepulauan Riau	33
Tabel 20.	Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Sumatera Barat	34
Tabel 21.	Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Jambi	35
Tabel 22.	Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Sumatera Selatan	35
Tabel 23.	Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung	36
Tabel 24.	Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Bengkulu	36
Tabel 25.	Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Lampung	37

Daftar Tabel :

Tabel 26. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah DKI Jakarta	37
Tabel 27. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Jawa Barat	37
Tabel 28. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Banten	39
Tabel 29. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah D. I Yogyakarta	39
Tabel 30. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Jawa Tengah	39
Tabel 31. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Jawa Timur	41
Tabel 32. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Kalimantan Barat	42
Tabel 33. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Kalimantan Tengah	43
Tabel 34. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Kalimantan Selatan	44
Tabel 35. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Kalimantan Timur	44
Tabel 36. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Kalimantan Utara	45
Tabel 37. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Sulawesi Utara	45
Tabel 38. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Gorontalo	46
Tabel 39. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Sulawesi Tengah	46
Tabel 40. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Sulawesi Selatan	47
Tabel 41. SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Sulawesi Tenggara	48
Tabel 42. SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Sulawesi Barat	48
Tabel 43. SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Bali	49
Tabel 44. SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Nusa Tenggara Barat	49
Tabel 45. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Nusa Tenggara Timur	50
Tabel 46. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Maluku	51
Tabel 47. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Maluku Utara	51
Tabel 48. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Papua Barat	52
Tabel 49. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Papua	52

Daftar Gambar :

Gambar 1. Indeks SPBE Nasional 2018 -2022		vii
Gambar 2. Tim Koordinasi SPBE Nasional		2
Gambar 3. Kriteria Tingkat Kematangan Proses		6
Gambar 4. Kriteria Tingkat Kematangan Layanan		7
Gambar 5. Struktur Penilaian Tingkat Kematangan SPBE		8
Gambar 6. Bobot Penilaian Domain dan Aspek		13
Gambar 7. Target Indeks Kematangan SPBE Nasional		14
Gambar 8. Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2022		15
Gambar 9. Dokumentasi Kegiatan		16
Gambar 10. Rerata Indeks Domain Nasional		17
Gambar 11. Rerata Indeks Domain Instansi Pusat		19
Gambar 12. Rerata Indeks Domain Pemerintah Daerah		22
Gambar 13. Distribusi Nilai Indeks SPBE Nasional		24

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam mendukung perkembangan Industri 4.0, pemanfaatan teknologi informasi dalam mengembangkan dan meningkatkan layanan publik telah diterapkan oleh berbagai Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD). Namun keberlangsungannya masih terkendala dalam penyelenggaraan yang belum terintegrasi, terpadu, dan berkesinambungan.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan menjadi prinsip utama Peraturan Presiden tersebut.

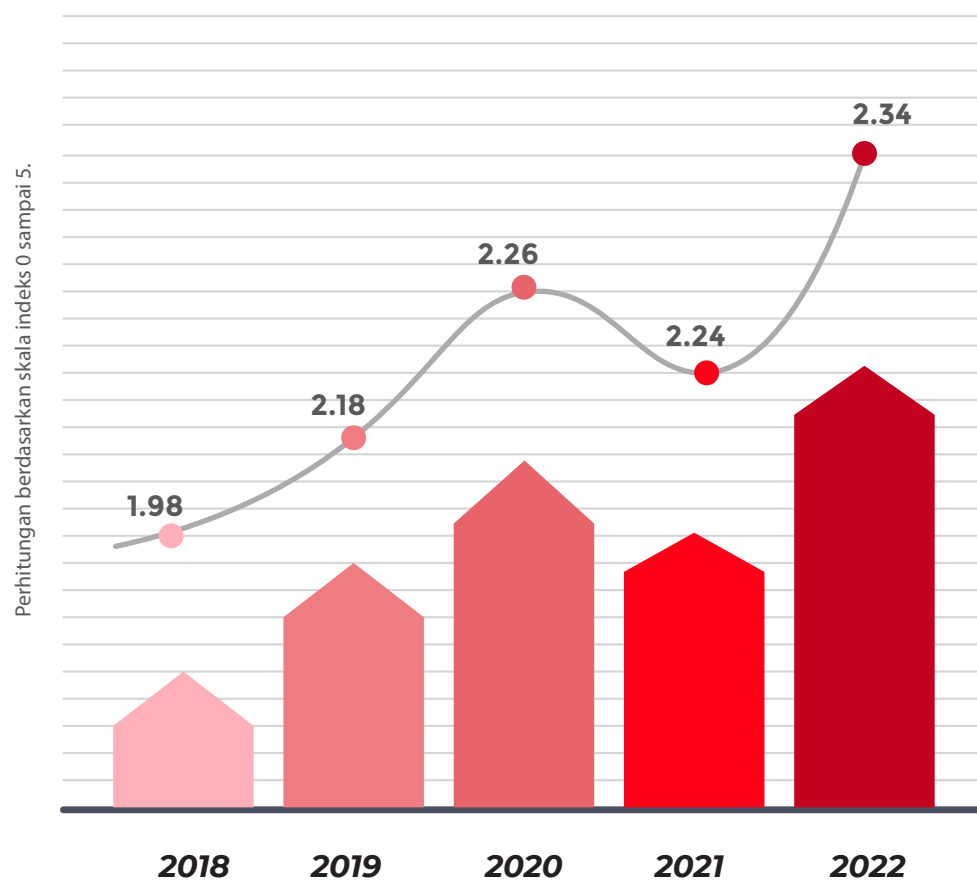
Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilakukan untuk mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatkan kualitas penerapan SPBE, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penilaian Pemantauan dan Evaluasi SPBE sudah dilakukan sejak tahun 2018. Kegiatan tersebut dilakukan terhadap Kementerian, Lembaga, Instansi Pusat lainnya, serta Pemerintah Daerah.

Sejak tahun 2021, pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE menggunakan instrumen yang tertuang pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Instrumen ini telah disesuaikan, dari pelaksanaan Evaluasi SPBE pada tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan 37 indikator menjadi 47 indikator.

Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2022 dilaksanakan dengan responden sebanyak 554 IPPD, serta 66 IPPD yang menggunakan indeks dari hasil Evaluasi SPBE tahun 2021. Hingga Desember 2022, masih terdapat 18 Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan evaluasi SPBE. Secara Nasional, indeks Tingkat Kematangan SPBE tahun 2022 adalah sebesar 2,34 atau setara dengan predikat “Cukup”.

Hasil ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dengan indeks senilai 2,24. Dari hasil Penilaian Tingkat Kematangan SPBE ini, masih terdapat sejumlah 383 dari 620 IPPD yang mendapat predikat di bawah “Baik”. Secara Nasional, Domain Layanan SPBE adalah domain dengan nilai indeks tertinggi yang memenuhi predikat “Baik” dimana rerata indeksnya sebesar 2,96. Namun sebaliknya, Domain Manajemen SPBE masih berada pada predikat “Kurang” yaitu dengan rerata indeks sebesar 1,32. Sementara Domain Tata Kelola dan Kebijakan Internal SPBE mendapatkan predikat “Cukup”, dimana masing-masing indeksnya adalah 1,85 dan 2,39.

[INDEKS SPBE NASIONAL 2018 - 2022]



Gambar 1. Indeks SPBE Nasional 2018 -2022

**”Mulailah sebuah
perjalanan dengan
tujuan akhir yang
jelas.**

- Joko Widodo

620

**Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah**



“Responden”

34 Kementerian

26 Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

22 Lembaga Non Struktural (LNS)

14 Lembaga Lainnya

**"Pemantauan dan Evaluasi SPBE
pada tahun 2022 telah dilaksanakan
dengan jumlah partisipasi **sebanyak
554 IPPD**"**



**34 Pemerintah Provinsi
93 Pemerintah Kota
397 Pemerintah Kabupaten**



Tentang SPBE

A. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pemanfaatan teknologi informasi telah banyak diimplementasikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) dalam mengembangkan dan meningkatkan layanannya, namun masih terkendala dalam penyelenggaraan yang belum terintegrasi, terpadu, dan berkesinambungan.

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Peraturan Presiden tersebut memegang prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Sehingga SPBE bukan hanya sekedar penggunaan aplikasi atau sistem informasi dalam pemerintahan, SPBE meliputi beberapa domain yaitu kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE.

B. Tim Koordinasi SPBE Nasional



Tim Koordinasi SPBE Nasional mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Tim Koordinasi SPBE Nasional dibentuk untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan dan Evaluasi SPBE Nasional. Tim Koordinasi SPBE Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.



Gambar 2. Tim Koordinasi SPBE Nasional

Tim Koordinasi SPBE Nasional terdiri atas:

A. Ketua : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

B. Anggota :

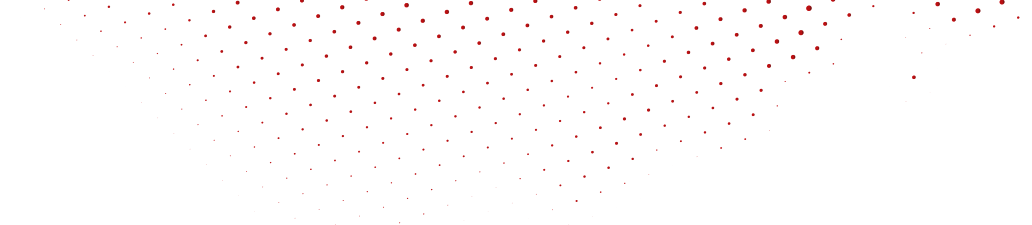
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
- Menteri Komunikasi dan Informatika
- Menteri Keuangan
- Menteri Dalam Negeri
- Kepala Badan Siber dan Sandi Negara
- Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional

Untuk mengukur kemajuan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional secara berkala melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

PEMANTAUAN DAN **EVALUASI SPBE**

Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE. Sedangkan Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE. Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatkan kualitas penerapan SPBE, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE, masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah melakukan penilaian mandiri, kemudian diikuti dengan tahapan penilaian eksternal untuk menjamin objektivitas dan independensi hasil penilaian. Penilaian eksternal terdiri atas tahapan penilaian dokumen, penilaian interview, dan penilaian visitasi. Dalam pelaksanaannya, penilaian eksternal dapat melibatkan unsur-unsur Aparatur Sipil Negara, akademisi atau tenaga ahli yang ditetapkan sebagai Asesor Eksternal. Asesor eksternal membantu dalam pelaksanaan sosialisasi dan pengolahan data laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2022, mekanisme yang dilakukan adalah pemantauan (wajib dan tambahan) serta evaluasi. Pemantauan wajib dilakukan terhadap IPPD yang memiliki indeks SPBE tahun 2021 di bawah 2,60, serta untuk pemantauan tambahan dilakukan terhadap IPPD yang indeks SPBE tahun 2021 di atas 2,60 dan mengajukan untuk dilakukan penilaian di tahun 2022. Sedangkan mekanisme evaluasi dilakukan terhadap IPPD yang belum mengikuti penilaian di tahun 2021.



Metode Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE adalah sebagai berikut :

1. Penilaian mandiri berupa penilaian yang dilakukan oleh Tim Asesor Internal IPPD terhadap penerapan SPBE pada masing-masing instansi.
2. Penilaian dokumen berupa verifikasi dan validasi terhadap penjelasan dan data dukung hasil penilaian mandiri dari Asesor Internal oleh Asesor Eksternal.
3. Penilaian interview dimana Asesor Eksternal melakukan klarifikasi dan validasi terhadap hasil penilaian mandiri kepada Asesor Internal dengan menentukan kembali tingkat kematangan sesuai hasil interview. Penilaian ini dilakukan melalui tanya-jawab antara Tim Asesor Eksternal dan Tim Asesor Internal untuk klarifikasi
4. Penilaian visitasi bagi Asesor Eksternal apabila pelaksanaannya diperlukan. Pada tahap ini Asesor Eksternal melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi lebih konkret terhadap hasil penilaian mandiri kepada Asesor Internal.
5. Penyusunan analisis kekuatan dan kelemahan serta rekomendasi oleh Asesor Eksternal sebagai laporan hasil evaluasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan 8 (delapan) Aspek SPBE.
6. Pelaksanaan review oleh Tim Review dengan menelaah dan memvalidasi hasil penilaian Asesor Eksternal. Tim Review akan memberikan saran dan petunjuk atas hasil penilaian berdasarkan ketentuan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

A. Metodologi Pengukuran Tingkat Kematangan **SPBE**

Model tingkat kematangan merupakan model pengukuran terhadap perkembangan kapabilitas/kemampuan organisasi pada suatu bidang yang ditunjukkan dengan tingkat kematangan. Tingkat kematangan SPBE merupakan metodologi yang digunakan dalam mengukur derajat pengembangan SPBE. Setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria. Kriteria yang dimaksud akan digunakan sebagai alat ukur untuk menilai perkembangan kapabilitas organisasi pada suatu bidang.

Metode tingkat kematangan pada evaluasi SPBE dikembangkan berdasarkan model-model tingkat kematangan yang telah dipraktekkan secara luas, yaitu:

- Capability Maturity Model yang dibangun oleh Software Engineering Institute (SEI). Model ini mengukur tingkat kematangan proses pengembangan perangkat lunak dan menjadi dasar pengembangan berbagai model tingkat kematangan lain seperti:
 - 1) Tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Control Objectives for Information Technology (COBIT);
 - 2) Tingkat kematangan arsitektur SPBE (Enterprise Architecture Maturity Model);
 - 3) Tingkat kematangan manajemen risiko (Risk Maturity Model);
 - 4) Tingkat kematangan manajemen pengetahuan (Knowledge Management Maturity Model);
 - 5) Tingkat kematangan manajemen data (Data Management Maturity Model);
 - 6) Tingkat kematangan manajemen keamanan informasi (Information Security Management Maturity Model).
- Model tersebut diadopsi untuk mengukur tingkat kematangan pada kapabilitas proses untuk domain kebijakan, tata kelola, dan manajemen SPBE.
- E-Government Maturity Models. Model tingkat kematangan yang mengukur tahapan pengembangan SPBE dari aspek kapabilitas layanan SPBE.

Tingkat kematangan terdiri atas kapabilitas proses dan kapabilitas layanan. Tingkat kematangan kapabilitas proses merupakan pengukuran kemampuan organisasi pada suatu proses dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan kebijakan, tata kelola, dan manajemen SPBE. Tingkat kematangan kapabilitas proses diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur, dan optimum. Detail pola pengukuran tingkat kematangan kapabilitas proses penerapan SPBE dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Kriteria Tingkat Kematangan Proses

Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan merupakan pengukuran kemampuan organisasi pada suatu layanan dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan layanan SPBE yaitu layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Tingkat kematangan kapabilitas layanan diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi, dan optimum. Kriteria tingkat kematangan kapabilitas layanan dapat dilihat pada Gambar 4.

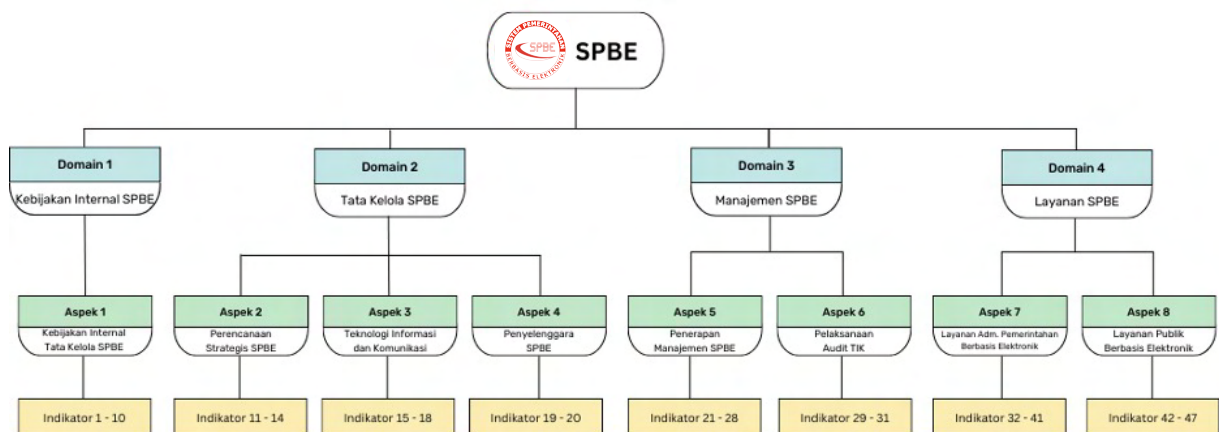


Gambar 4. Kriteria Tingkat Kematangan Layanan

B. Struktur Penilaian

Struktur penilaian tingkat kematangan SPBE terdiri dari beberapa hal, diantaranya:

1. Domain, merupakan area penerapan SPBE yang dinilai.
2. Aspek, merupakan area spesifik penerapan SPBE yang dinilai.
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek penerapan SPBE yang dinilai.



Gambar 5. Struktur Penilaian Tingkat Kematangan SPBE

Setiap domain terdiri dari satu atau beberapa aspek, dan setiap aspek terdiri dari beberapa indikator. Detail domain, aspek, dan indikator pada struktur penilaian tingkat kematangan SPBE dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Domain/Aspek/Indikator	Deskripsi
Domain 1	Kebijakan SPBE
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Indikator 1	Tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 2	Tingkat kematangan kebijakan internal peta rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 3	Tingkat kematangan kebijakan internal manajemen data
Indikator 4	Tingkat kematangan kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE
Indikator 5	Tingkat kematangan kebijakan internal layanan Pusat Data
Indikator 6	Tingkat kematangan kebijakan internal layanan jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 7	Tingkat kematangan kebijakan internal penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 8	Tingkat kematangan kebijakan internal manajemen keamanan informasi
Indikator 9	Tingkat kematangan kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi
Indikator 10	Tingkat kematangan kebijakan internal tim koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

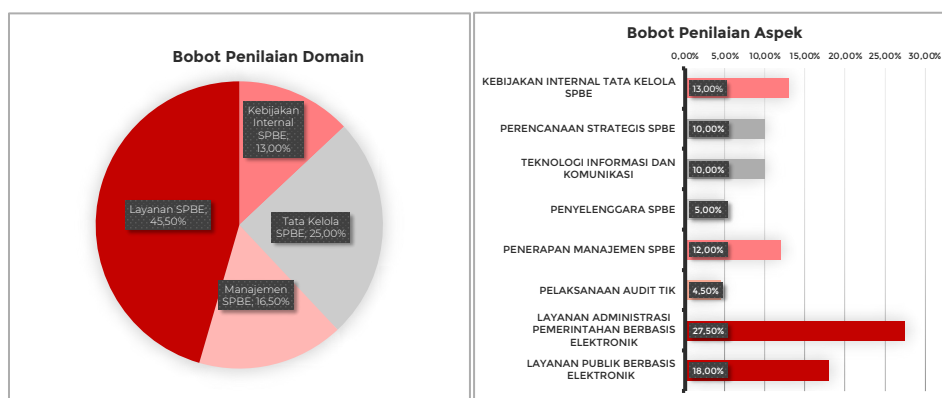
Domain 2	Tata Kelola SPBE
Aspek 2	Perencanaan Strategis SPBE
Indikator 11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE
Indikator 14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE
Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator 15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE
Indikator 16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data
Indikator 17	Tingkat kematangan layanan jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 18	Tingkat kematangan penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah
Aspek 4	Penyelenggaraan SPBE
Indikator 19	Tingkat kematangan pelaksanaan tim koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 20	Tingkat kematangan kolaborasi penerapan SPBE

Domain 3	Manajemen SPBE
Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE
Indikator 21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE
Indikator 22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi
Indikator 23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data
Indikator 24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK
Indikator 25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Indikator 26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan
Indikator 27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan
Indikator 28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE
Aspek 6	Pelaksanaan Audit TIK
Indikator 29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE
Indikator 30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE
Indikator 31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE
Domain 4	Layanan SPBE
Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan

Indikator 33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran
Indikator 34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan
Indikator 35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Indikator 36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian
Indikator 37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis
Indikator 38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Indikator 39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah
Indikator 40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Indikator 41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai
Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik
Indikator 42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
Indikator 43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka
Indikator 44	Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Indikator 45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1
Indikator 46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2
Indikator 47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3

C. Bobot Penilaian dan Predikat Indeks SPBE

Bobot penilaian diberikan pada setiap struktur penilaian yaitu domain, aspek, dan indikator sesuai tingkat prioritas dan kepentingan. Bobot penilaian untuk setiap domain, aspek, dan indikator berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 6 dan Tabel 2.



Gambar 6. Bobot Penilaian Domain dan Aspek

Tabel 2. Bobot Penilaian Indikator

Domain	Aspek	Nomor Indikator	Bobot Tiap Indikator
Kebijakan Internal SPBE	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Indikator 1-10	1,30%
Tata Kelola SPBE	Perencanaan Strategis SPBE	Indikator 11-14	2,50%
	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Indikator 15-18	2,50%
	Penyelenggara SPBE	Indikator 19-20	2,50%
Manajemen SPBE	Penerapan Manajemen SPBE	Indikator 21-28	1,50%
	Pelaksanaan Audit TIK	Indikator 29-31	1,50%
Layanan SPBE	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indikator 32-41	2,75%
	Layanan Publik Berbasis Elektronik	Indikator 42-47	3,00%

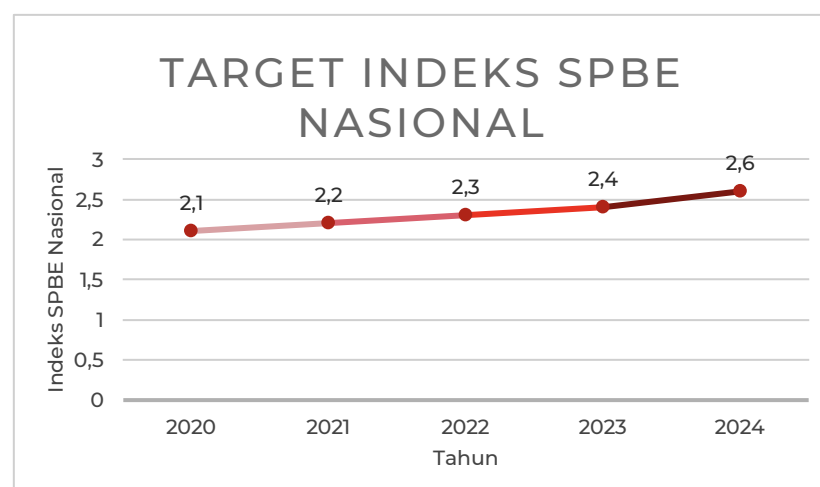
Nilai indeks tingkat kematangan SPBE, masing masing dihitung secara agregat dari nilai tingkat kematangan indikator. Nilai indeks terdiri dari beberapa jenis, diantaranya:

1. Nilai Indeks Aspek. Indeks aspek merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada suatu aspek.
2. Nilai Indeks Domain. Indeks domain merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada suatu domain tertentu.
3. Nilai Indeks SPBE. Indeks SPBE merepresentasikan kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Penilaian indeks SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat sesuai pada Tabel 3.

Tabel 3. Predikat indeks SPBE

No.	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat “Baik” (indeks minimal: 2,6)



Gambar 7. Target Indeks Kematangan SPBE Nasional

D. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi **SPBE** Tahun 2022

Pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh:

1. Tim Pelaksana Kegiatan Evaluasi SPBE yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana kegiatan Evaluasi SPBE dari Kementerian PANRB dan perwakilan Kementerian dan Lembaga yang tergabung dalam Tim Koordinasi SPBE Nasional.
2. Tim Asesor Eksternal dari 25 Perguruan Tinggi.

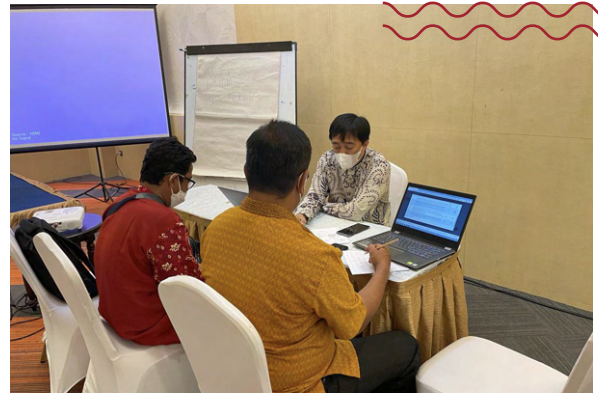


Gambar 8. Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2022

Selain kedua tim di atas, terdapat Asesor Internal yang merupakan pejabat atau pegawai dari masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Asesor Internal terlibat dalam pengumpulan data pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi SPBE juga bergantung pada komitmen partisipasi Instansi Pusat dan Pemerintah daerah dalam mengikuti setiap agenda yang telah dijadwalkan. Hingga Desember 2022, masih terdapat 18 Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan evaluasi SPBE.

Dokumentasi Kegiatan.

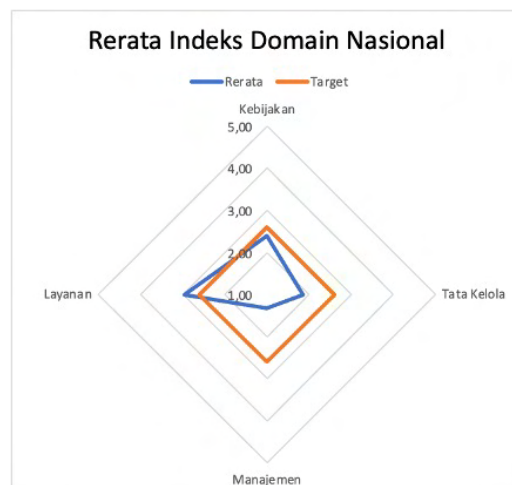


Gambar 9. Dokumentasi Kegiatan.

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE



Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2022 dilaksanakan dengan responden sebanyak 620 dari 638 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (3 Instansi telah bergabung dalam BRIN). Sejumlah 66 IPPD menggunakan indeks dari hasil Evaluasi SPBE tahun 2021, 451 IPPD menggunakan indeks dari hasil Pemantauan SPBE tahun 2022, dan 103 IPPD menggunakan indeks dari hasil Evaluasi SPBE tahun 2022.



Gambar 10. Rerata Indeks Domain Nasional

Tabel 4. Nilai Indeks Domain Nasional

Nasional	Domain				Indeks
	Kebijakan Internal SPBE	Tata Kelola SPBE	Manajemen SPBE	Layanan SPBE	
Rerata	2,39	1,85	1,32	2,96	2,34
Target	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
MAX	5,00	4,00	3,82	4,75	3,86
MIN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



Secara Nasional, indeks Tingkat Kematangan SPBE tahun 2022 adalah 2,34 atau setara dengan predikat “Cukup”. Seperti yang tergambarkan pada Gambar 10, berdasarkan 4 (empat) Domain yang diukur, Domain Layanan memiliki nilai rerata indeks tertinggi dengan predikat “Baik” sebesar 2,96 diikuti oleh Domain Kebijakan dengan indeks 2,39, Domain Tata Kelola dengan indeks 1,85, dan Domain Manajemen dengan indeks 1,32. Berdasarkan data pada Tabel 4, seluruh domain memiliki target untuk mencapai predikat “Baik” dengan nilai indeks minimal sebesar 2,60. Namun, berdasarkan hasil penilaian, hanya Domain Layanan SPBE yang dapat melampaui target. Sehingga, secara umum hasil penilaian indeks Domain Nasional belum mencapai predikat “Baik”. Indeks tertinggi secara Nasional dicapai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nilai 3,86 yang setara dengan predikat “Sangat Baik”.

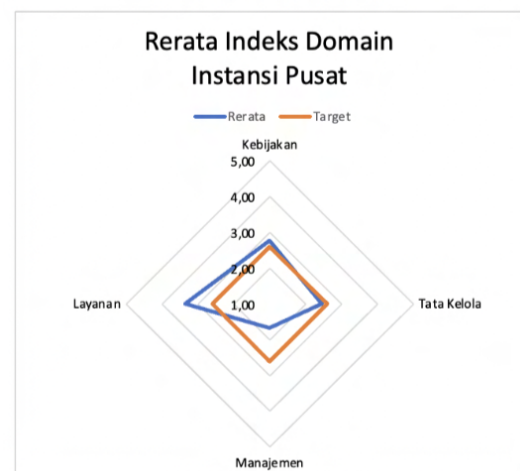
Domain Layanan SPBE memiliki rerata indeks nasional tertinggi, yaitu sebesar 2,96 atau setara dengan predikat “Baik”. Pada domain ini terdapat IPPD dengan nilai indeks tertinggi sebesar 4,75 dan nilai terendah sebesar 1,00. Domain ini memiliki 2 (dua) aspek, diantaranya Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik. Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan layanan sehari-hari dalam pemerintahan yang dilakukan oleh setiap IPPD. Sementara, Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik merupakan layanan pemerintah yang disediakan untuk masyarakat agar dapat memberikan pelayanan secara cepat dan efisien.

Domain Kebijakan Internal SPBE memiliki rerata indeks nasional tertinggi kedua, yaitu sebesar 2,39 atau setara dengan predikat “Cukup”. Dari keseluruhan hasil penilaian, Kebijakan Internal SPBE sudah terdapat IPPD yang memiliki nilai tertinggi sebesar 5,00 dan nilai terendah sebesar 1,00. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan Kebijakan Internal SPBE sudah terdapat Instansi yang melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi kebijakan yang telah diterapkan pada Instansinya. Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE menjadi satu-satunya bagian dari domain ini.

Selanjutnya, domain Tata Kelola SPBE yang memiliki rerata indeks nasional 1,85 atau setara dengan predikat “Cukup”. Pada domain ini terdapat IPPD dengan nilai indeks tertinggi 4,00 dan terendah 1,00. Domain Tata Kelola SPBE memiliki 3 (tiga) aspek, diantaranya Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Penyelenggara SPBE.

Berikutnya, domain Manajemen SPBE. Domain ini memiliki rerata indeks terendah secara nasional, yaitu 1,32 atau setara dengan predikat “Kurang”. Hal ini menunjukkan, bahwa penerapan Manajemen SPBE masih belum optimal. Nilai indeks IPPD tertinggi pada domain tersebut mencapai 3,82 dan indeks terendah menduduki nilai indeks minimal yaitu 1,00. Terdapat 2 (dua) aspek di dalamnya, yaitu Aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Pelaksanaan Audit TIK.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Domain Layanan menjadi satu-satunya domain yang telah mencapai target dengan predikat “Baik”. Domain Kebijakan Internal dan Tata Kelola SPBE mendapatkan predikat “Cukup”, maka pada setiap aspeknya masih memerlukan peningkatan. Serta, Domain Manajemen SPBE yang masih dengan predikat “Kurang” yang menjadikan domain ini masih memerlukan banyak perbaikan pada penerapan manajemen SPBE di IPPD kedepannya.



Gambar 11. Rerata Indeks Domain Instansi Pusat

Tabel 5. Nilai Indeks Domain Instansi Pusat

Instansi Pusat	Domain				Indeks
	Kebijakan Internal SPBE	Tata Kelola SPBE	Manajemen SPBE	Layanan SPBE	
Rerata	2,77	2,44	1,67	3,36	2,79
Target	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
MAX	5,00	4,00	3,36	4,75	3,86
MIN	1,00	1,00	1,00	1,07	1,08

Indeks Tingkat Kematangan SPBE tahun 2022 pada Instansi Pusat adalah 2,79 atau setara dengan predikat “Baik”. Seperti yang tergambarkan pada Gambar 11, berdasarkan 4 (empat) Domain yang diukur, Domain Layanan memiliki nilai rerata indeks tertinggi sebesar 2,96 diikuti oleh Domain Kebijakan dengan rerata indeks 2,77. Kedua domain tersebut telah mencapai predikat “Baik”, diikuti Domain Tata Kelola dengan indeks 2,44 dan Domain Manajemen dengan indeks 1,67. Berdasarkan data pada Tabel 5, hanya Domain Layanan dan Kebijakan Internal SPBE yang dapat melampaui target.

Domain Layanan SPBE memiliki rerata indeks tertinggi pada Instansi Pusat, yaitu sebesar 3,36 atau setara dengan predikat “Baik”. Pada domain ini terdapat Instansi Pusat dengan nilai indeks tertinggi sebesar 4,75 dan nilai terendah sebesar 1,07. Domain ini memiliki 2 (dua) aspek, diantaranya Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.

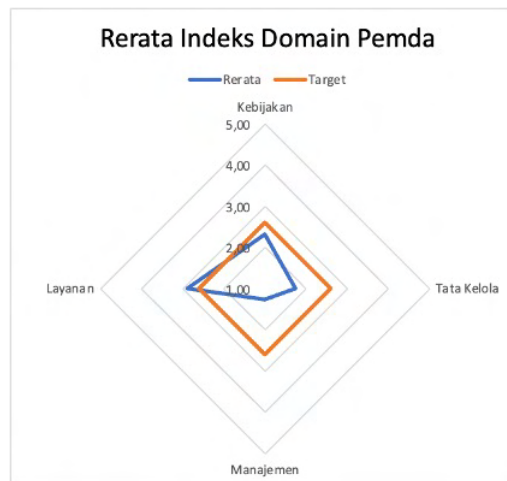


Domain Kebijakan Internal SPBE memiliki rerata indeks tertinggi kedua pada Instansi Pusat, yaitu sebesar 2,77 atau setara dengan predikat “Baik”. Dari keseluruhan hasil penilaian, Kebijakan Internal SPBE sudah terdapat IPPD yang memiliki nilai tertinggi sebesar 5,00 dan nilai terendah sebesar 1,00. Hal ini menunjukkan bahwa sudah terdapat Instansi Pusat yang melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi seluruh kebijakan internal SPBE yang telah diterapkan.

Domain Tata Kelola SPBE pada Instansi Pusat memiliki rerata indeks 2,44 atau setara dengan predikat “Cukup”. Pada domain ini terdapat IPPD dengan nilai indeks tertinggi 4,00 dan terendah 1,00. Domain Tata Kelola SPBE memiliki 3 (tiga) aspek, diantaranya Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Penyelenggara SPBE.

Berikutnya, Domain Manajemen SPBE. Domain ini memiliki rerata indeks terendah pada Instansi Pusat, yaitu 1,67 atau setara dengan predikat “Kurang”. Hal ini menunjukkan, bahwa penerapan Manajemen SPBE pada Instansi Pusat masih belum optimal. Nilai indeks tertinggi pada domain tersebut mencapai 3,36 dan indeks terendah menduduki nilai indeks minimal yaitu 1,00. Terdapat 2 (dua) aspek di dalamnya, yaitu Aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Pelaksanaan Audit TIK.

Sehingga, hasil penilaian terhadap penerapan SPBE pada Instansi Pusat menunjukkan bahwa Domain Layanan dan Kebijakan Internal telah mencapai target dengan predikat “Baik”. Namun, Domain Tata Kelola SPBE berada pada predikat “Cukup” dan Domain Manajemen SPBE dengan predikat “Kurang”, yang menjadikan kedua domain ini masih memerlukan banyak perbaikan kedepannya.



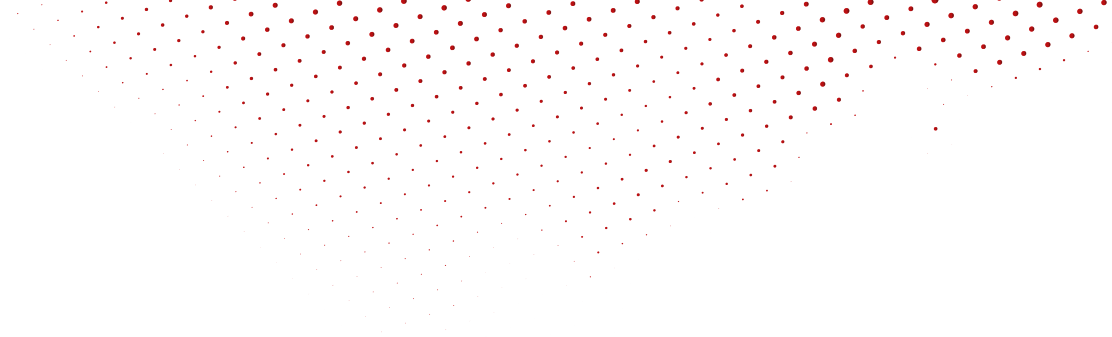
Gambar 12. Rerata Indeks Domain Pemerintah Daerah

Tabel 6. Nilai Indeks Domain Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah	Domain				Indeks
	Kebijakan Internal SPBE	Tata Kelola SPBE	Manajemen SPBE	Layanan SPBE	
Rerata	2,32	1,74	1,26	2,88	2,26
Target	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
MAX	5,00	4,00	3,82	4,60	3,84
MIN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Indeks Tingkat Kematangan SPBE tahun 2022 pada Pemerintah Daerah adalah 2,26 atau setara dengan predikat “Cukup”. Seperti yang tergambarkan pada Gambar 12, berdasarkan 4 (empat) Domain yang diukur, Domain Layanan memiliki nilai rerata indeks tertinggi sebesar 2,88. Berdasarkan data pada Tabel 6, hanya Domain Layanan yang melampaui target, domain lainnya yaitu Kebijakan mendapatkan indeks 2,32, Tata Kelola mendapatkan indeks 1,74, dan Manajemen SPBE mendapatkan indeks 1,26.

Domain Layanan SPBE memiliki rerata indeks tertinggi pada Pemerintah Daerah, yaitu sebesar 2,88 atau setara dengan predikat “Baik”. Pada domain ini terdapat Pemerintah Daerah dengan nilai indeks tertinggi sebesar 4,60 dan nilai terendah sebesar 1,00. Domain ini memiliki 2 (dua) aspek, diantaranya Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.



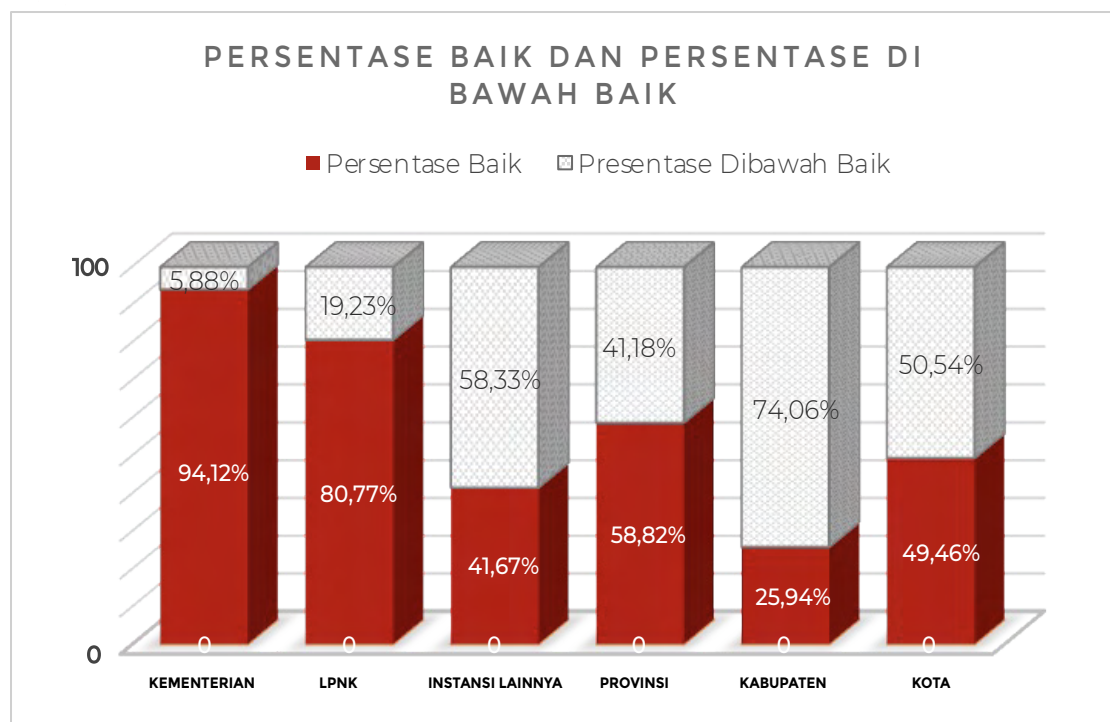
Domain Kebijakan Internal SPBE memiliki rerata indeks tertinggi kedua pada Pemerintah Daerah, yaitu sebesar 2,32 atau setara dengan predikat “Cukup”. Dari keseluruhan hasil penilaian, Kebijakan Internal SPBE sudah terdapat Pemerintah Daerah yang memiliki nilai tertinggi sebesar 5,00 dan nilai terendah sebesar 1,00. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat Pemerintah Daerah yang melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi seluruh kebijakan internal SPBE yang telah diterapkan.

Domain Tata Kelola SPBE pada Pemerintah Daerah memiliki rerata indeks 1,74 atau setara dengan predikat “Kurang”. Pada domain ini terdapat Pemerintah Daerah dengan nilai indeks tertinggi 4,00 dan terendah 1,00. Domain Tata Kelola SPBE memiliki 3 (tiga) aspek, diantaranya Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Penyelenggara SPBE.

Berikutnya, yaitu Domain Manajemen SPBE. Domain ini memiliki rerata indeks terendah pada Pemerintah Daerah, yaitu 1,26 atau setara dengan predikat “Kurang”. Hal ini menunjukkan, bahwa penerapan Manajemen SPBE pada Pemerintah Daerah masih belum optimal. Nilai indeks tertinggi pada domain tersebut mencapai 3,82 dan indeks terendah menduduki nilai indeks minimal yaitu 1,00. Terdapat 2 (dua) aspek di dalamnya, yaitu Aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Pelaksanaan Audit TIK.

Sehingga, hasil penilaian terhadap penerapan SPBE pada Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa hanya Domain Layanan yang telah mencapai target dengan predikat “Baik”. Domain Kebijakan mendapat predikat “Cukup”, dimana Tata Kelola SPBE dan Domain Manajemen SPBE masih berada pada predikat “Kurang”. Hal ini menunjukkan bahwa pada penerapan SPBE pada Pemerintah Daerah masih memerlukan banyak peningkatan terutama pada Domain Kebijakan, Tata Kelola, dan Manajemen SPBE.





Gambar 13. Distribusi Nilai Indeks SPBE Nasional

Dari hasil penilaian tingkat kematangan SPBE, masih terdapat 61,77% dari 620 IPPD atau sejumlah 383 IPPD yang mendapat predikat di bawah “Baik”. Jika ditelaah perbandingan tingkat kematangan Domain SPBE antara Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah, dapat kita ketahui bahwa secara rata-rata kematangan dengan predikat “Kurang” terdapat pada Domain Manajemen SPBE. Sementara, pada Domain Layanan SPBE baik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah secara rata-rata sudah mencapai tingkat kematangan dengan predikat “Baik”. Pada Instansi Pusat, Domain Kebijakan Internal SPBE sudah mencapai predikat “Baik”, berbeda halnya pada Pemerintah Daerah yang masih berada pada predikat “Cukup”. Domain Tata Kelola SPBE juga menduduki tingkat kematangan yang berbeda di Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah. Pada Instansi Pusat predikat pada domain tersebut dinilai “Cukup”, sementara pada Pemerintah Daerah masih berada dalam predikat “Kurang”.

Tabel 7. Nilai Indeks Kematangan SPBE

	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS	Instansi Lainnya	LNS & Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2.34	3.14	2.92	2.29	2.39	2.33	2.73	2.16	2.50
D1. Kebijakan Tata Kelola	2.39	3.08	2.88	2.39	2.39	2.39	2.69	2.23	2.61
A1. Kebijakan Tata Kelola	2.39	3.08	2.88	2.39	2.39	2.39	2.69	2.23	2.61
D2. Tata Kelola	1.85	2.86	2.59	1.94	1.96	1.94	2.27	1.53	1.98
A2. Perencanaan	1.70	2.63	2.33	1.91	1.89	1.90	2.00	1.53	1.70
A3. TIK	1.92	2.93	2.77	2.03	2.05	2.04	2.40	1.68	2.11
A4. Penyelenggara	2.02	3.16	2.75	1.80	1.89	1.83	2.57	1.78	2.28
D3. Manajemen	1.32	2.01	1.64	1.33	1.42	1.36	1.51	1.21	1.36
A5. Manajemen	1.35	2.14	1.62	1.34	1.43	1.37	1.55	1.23	1.41
A6. Audit	1.24	1.66	1.69	1.30	1.40	1.34	1.38	1.15	1.23
D4. Layanan SPBE	2.96	3.72	3.58	2.79	2.98	2.86	3.43	2.77	3.16
A7. Layanan Adm	3.00	3.71	3.58	2.96	3.24	3.07	3.43	2.81	3.21
A8. Layanan Publik	2.89	3.74	3.58	2.52	2.60	2.55	3.44	2.71	3.10

Di sisi lain, jika membandingkan hasil penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan kategori, Kementerian memperoleh rerata indeks kematangan tertinggi sebesar 3,14. Sementara, Pemerintah Kabupaten mendapatkan rerata indeks kematangan terendah yaitu 2,16. Kementerian, LPNK, dan Pemerintah Provinsi secara rerata indeks sudah mencapai predikat “Baik”. Sedangkan untuk LNS, Instansi Lainnya, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota masih berada pada predikat “Kurang” dari rerata indeks yang diperoleh.

A. Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE Instansi Pusat

No.	Parameter	Keterangan
1	D1	Domain Kebijakan Internal SPBE
2	D2	Domain Tata Kelola SPBE
3	D3	Domain Manajemen SPBE
4	D4	Domain Layanan SPBE

Tabel 8. Indeks SPBE Kementerian

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.70	2.80	1.45	3.57	2.92*	Baik
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	3.00	2.30	1.18	3.50	2.75*	Baik
Kementerian Luar Negeri	2.10	2.80	1.00	3.81	2.87*	Baik
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2.90	3.30	2.45	4.57	3.68*	Sangat Baik
Kementerian Keuangan	4.30	4.00	1.27	4.28	3.72*	Sangat Baik
Kementerian Komunikasi dan Informatika	4.10	3.80	2.09	4.37	3.82*	Sangat Baik
Kementerian Perdagangan	4.70	3.10	2.64	3.52	3.42*	Baik
Kementerian Sekretariat Negara	1.90	2.50	2.00	3.69	2.88*	Baik
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	2.60	2.70	1.00	3.57	2.80*	Baik
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	2.90	2.80	2.09	3.30	2.92	Baik
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1.50	2.20	1.64	3.49	2.60	Baik
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	4.00	2.20	2.18	3.29	2.93	Baik
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	1.00	2.60	2.18	3.37	2.68	Baik
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	3.80	2.30	2.18	3.24	2.90	Baik
Kementerian Badan Usaha Milik Negara	4.50	3.00	3.09	4.37	3.84	Sangat Baik

*) Hasil Evaluasi SPBE 2021

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2.80	2.50	2.09	3.68	3.01	Baik
Kementerian Pemuda dan Olahraga	3.90	3.10	2.55	3.55	3.32	Baik
Kementerian Dalam Negeri	4.80	3.80	2.64	3.56	3.63	Sangat Baik
Kementerian Pertahanan	3.00	2.50	1.09	3.12	2.62	Baik
Kementerian Pertanian	3.00	3.60	3.36	4.19	3.75	Sangat Baik
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	2.50	3.20	1.36	4.75	3.51	Sangat Baik
Kementerian Perhubungan	3.90	3.10	1.00	4.14	3.33	Baik
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	3.80	3.50	2.82	4.45	3.86	Sangat Baik
Kementerian Kesehatan	1.50	2.80	2.73	3.51	2.94	Baik
Kementerian Agama	2.50	1.50	1.00	3.06	2.26	Cukup
Kementerian Ketenagakerjaan	2.30	2.80	2.18	3.26	2.84	Baik
Kementerian Sosial	2.70	2.50	1.18	2.45	2.28	Cukup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.30	1.70	2.18	3.62	2.73	Baik
Kementerian Kelautan dan Perikanan	3.00	3.20	2.00	3.92	3.30	Baik
Kementerian Perindustrian	3.10	2.00	2.27	3.50	2.87	Baik
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	3.80	3.40	1.18	3.59	3.17	Baik
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.10	2.90	2.82	4.01	3.42	Baik
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	3.10	3.40	2.55	4.27	3.62	Sangat Baik
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	3.70	3.20	2.73	4.01	3.55	Sangat Baik

Tabel 9. Indeks SPBE Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Badan Riset dan Inovasi Nasional	4.20	3.50	1.27	3.95	3.43	Baik
Badan Kepegawaian Negara	2.70	2.90	1.00	3.68	2.92*	Baik

*) Hasil Evaluasi SPBE 2021

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	4.00	3.20	3.09	4.01	3.66*	Sangat Baik
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1.00	1.00	1.00	2.64	1.75*	Kurang
Badan Tenaga Nuklir Nasional	1.10	3.20	1.09	3.07	2.528*	Cukup
Badan Pusat Statistik	3.50	3.70	2.45	4.45	3.81*	Sangat Baik
Badan Informasi Geospasial	2.40	2.40	1.82	3.81	2.95*	Baik
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	4.80	2.60	2.00	3.40	3.15*	Baik
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	2.30	2.70	1.09	3.41	2.71*	Baik
Badan Standardisasi Nasional	5.00	3.90	2.36	2.94	3.35*	Baik
Badan Pengawas Tenaga Nuklir	2.80	3.20	1.00	3.75	3.03*	Baik
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	2.20	2.40	1.00	3.57	2.68*	Baik
Badan Siber dan Sandi Negara	2.70	2.60	1.64	3.51	2.87	Baik
Lembaga Administrasi Negara	4.70	2.90	3.00	3.82	3.57	Sangat Baik
Arsip Nasional Republik Indonesia	3.50	2.00	1.91	3.24	2.74	Baik
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	3.30	2.50	1.36	3.69	2.96	Baik
Perpustakaan Nasional RI	3.90	3.40	2.36	3.88	3.51	Sangat Baik
Badan Pengawas Obat dan Makanan	2.70	2.60	1.27	4.19	3.12	Baik
Lembaga Ketahanan Nasional RI	2.30	2.00	1.45	3.37	2.57	Cukup
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	2.90	2.20	2.09	3.11	2.69	Baik
Badan Narkotika Nasional	1.40	1.50	1.00	3.19	2.17	Cukup
Badan Keamanan Laut	2.90	2.30	1.36	3.37	2.71	Baik
Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan	2.90	2.10	1.27	3.82	2.85	Baik
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2.80	2.50	1.55	4.32	3.21	Baik
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1.10	1.30	1.00	3.00	2.00	Cukup
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	1.70	2.70	2.18	3.94	3.05	Baik

*) Hasil Evaluasi SPBE 2021

Tabel 10. Indeks SPBE Alat Negara

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Badan Intelijen Negara	4.10	3.30	2.55	2.98	3.13	Baik

Tabel 11. Indeks SPBE Sekretariat Kabinet

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Sekretariat Kabinet	1.00	2.00	1.18	3.24	2.30	Cukup

Tabel 12. Indeks SPBE Sekretariat Jenderal Lembaga Negara

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Kejaksaan Agung	3.00	1.40	1.18	2.73	2.18	Cukup
Majelis Permusyawaratan Rakyat	3.00	2.30	1.64	3.37	2.77	Baik
Dewan Perwakilan Rakyat	3.10	2.40	1.64	3.68	2.95	Baik
Mahkamah Agung RI	2.50	2.00	2.09	3.16	2.61	Baik
Badan Pemeriksa Keuangan	2.40	1.80	1.00	3.86	2.68	Baik
Mahkamah Konstitusi	2.40	1.40	1.09	2.11	1.80	Cukup
Komisi Yudisial	1.40	1.20	1.09	2.54	1.82	Cukup
Dewan Perwakilan Daerah	1.90	2.00	1.82	2.50	2.18	Cukup

Tabel 13. Indeks SPBE Instansi Lainnya

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	1.20	1.70	1.27	3.37	2.32	Cukup

Tabel 14. Indeks SPBE Lembaga Penyiaran Publik

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Televisi Republik Indonesia	2.70	1.30	1.00	2.74	2.09	Cukup
Radio Republik Indonesia	1.80	2.00	1.36	2.30	2.01	Cukup

Tabel 15. Indeks SPBE Lembaga Nonstruktural (LNS)

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	3.00	1.20	1.00	3.43	2.42	Cukup
Komisi Pemberantasan Korupsi	3.80	2.50	1.91	4.37	3.42*	Baik
Badan Nasional Pengelola Perbatasan	2.60	2.60	1.45	3.25	2.71*	Baik
Komisi Informasi Pusat	2.10	2.10	1.64	2.68	2.29*	Cukup
Badan Amil Zakat Nasional	1.90	1.60	1.36	1.37	1.49*	Kurang
Badan Nasional Sertifikasi Profesi	1.00	1.00	1.00	2.18	1.54	Kurang
Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi	2.30	2.50	1.00	3.69	2.77	Baik
Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia	3.00	2.60	1.00	3.18	2.65*	Baik
Dewan Ketahanan Nasional	3.40	2.80	1.00	2.91	2.63	Baik
Komisi Pemilihan Umum	2.70	2.30	1.09	3.57	2.73	Baik
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	3.20	2.20	1.64	3.55	2.85	Baik
Ombudsman Republik Indonesia	3.40	2.80	1.55	3.55	3.01	Baik
Komisi Pengawas Persaingan Usaha	2.00	1.00	1.00	1.57	1.39	Kurang
Badan Pengawas Pemilihan Umum	2.80	1.50	1.09	1.93	1.80	Kurang
Komisi Penyiaran Indonesia	1.00	1.60	1.18	3.54	2.34	Cukup
Komisi Kejaksaan	1.20	1.10	1.00	1.07	1.08	Kurang
Komisi Aparatur Sipil Negara	3.20	3.60	2.91	3.32	3.31	Baik
Dewan Pers	1.10	1.30	1.18	1.66	1.42	Kurang
Dewan Jaminan Sosial Nasional	3.90	2.20	2.00	2.92	2.71	Baik
Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	1.70	1.60	1.00	2.03	1.71	Kurang
Lembaga Sensor Film	2.40	1.20	1.00	3.00	2.14	Cukup
Konsil Kedokteran Indonesia	1.00	1.40	1.00	3.04	2.03	Cukup
Kantor Staf Presiden	2.90	2.50	1.18	2.74	2.44	Cukup

*) Hasil Evaluasi SPBE 2021

B. Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah

Tabel 16. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Aceh

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Pemerintah Aceh	2.80	2.90	1.00	3.31	2.76	Baik
Pemerintah Kab. Aceh Besar	1.00	1.20	1.00	2.82	1.88	Cukup
Pemerintah Kab. Pidie	1.00	1.70	1.00	2.93	2.05	Cukup
Pemerintah Kab. Aceh Utara	1.00	1.10	1.00	2.36	1.65	Kurang
Pemerintah Kab. Aceh Timur	2.60	1.10	1.00	3.32	2.29	Cukup
Pemerintah Kab. Aceh Selatan	1.00	1.00	1.00	2.09	1.50	Kurang
Pemerintah Kab. Aceh Barat	3.10	2.10	1.91	3.05	2.63	Baik
Pemerintah Kab. Aceh Tengah	1.80	1.10	1.00	1.00	1.13	Kurang
Pemerintah Kab. Aceh Tenggara	1.00	1.00	1.00	2.48	1.68	Kurang
Pemerintah Kab. Simeulue	1.40	1.00	1.00	1.25	1.16*	Kurang
Pemerintah Kab. Bireuen	1.20	1.00	1.00	3.37	2.10	Cukup
Pemerintah Kab. Aceh Singkil*	2.60	1.00	1.09	2.60	1.95*	Cukup
Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya	1.40	1.30	1.00	2.14	1.64	Kurang
Pemerintah Kab. Gayo Lues	1.20	1.10	1.09	2.29	1.65	Kurang
Pemerintah Kab. Aceh Tamiang	2.60	2.00	1.09	3.51	2.62	Baik
Pemerintah Kab. Nagan Raya	1.20	1.40	1.36	3.24	2.20	Cukup
Pemerintah Kab. Aceh Jaya	1.20	1.10	1.00	3.17	2.04	Cukup
Pemerintah Kab. Bener Meriah	2.70	1.80	1.45	3.43	2.60	Baik
Pemerintah Kab. Pidie Jaya	1.00	1.00	1.00	2.25	1.57	Kurang
Pemerintah Kota Sabang	1.20	1.00	1.00	2.23	1.59	Kurang
Pemerintah Kota Banda Aceh	5.00	2.60	1.91	3.36	3.15	Baik
Pemerintah Kota Langsa	2.40	1.10	1.00	2.36	1.82	Cukup
Pemerintah Kota Lhokseumawe	1.50	1.00	1.00	2.03	1.54*	Kurang
Pemerintah Kota Subulussalam	1.00	1.00	1.00	2.74	1.79	Kurang

*) Hasil Evaluasi SPBE 2021

Tabel 17. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Sumatera Utara

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	3.10	2.10	1.73	3.51	2.81	Baik
Pemerintah Kab. Deli Serdang	4.20	3.10	1.91	3.69	3.32	Baik
Pemerintah Kab. Karo	3.10	1.60	1.00	3.19	2.42	Cukup
Pemerintah Kab. Langkat	4.20	2.10	1.64	3.68	3.02	Baik
Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah	1.90	1.10	1.00	2.11	1.65	Kurang
Pemerintah Kab. Simalungun	1.00	1.10	1.00	2.63	1.77	Kurang
Pemerintah Kab. Labuhanbatu	1.40	1.60	1.09	2.40	1.85	Cukup
Pemerintah Kab. Dairi	2.40	1.20	1.00	2.86	2.08	Cukup
Pemerintah Kab. Tapanuli Utara	2.80	2.00	1.00	2.99	2.39	Cukup
Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan	2.70	1.90	1.73	3.44	2.68	Baik
Pemerintah Kab. Asahan	1.20	1.10	1.00	2.02	1.51	Kurang
Pemerintah Kab. Nias	1.30	1.30	1.00	3.06	2.05	Cukup
Pemerintah Kab. Toba	2.30	1.20	1.00	2.48	1.89	Cukup
Pemerintah Kab. Mandailing Natal	3.60	2.10	1.18	3.05	2.58	Cukup
Pemerintah Kab. Nias Selatan	1.00	1.00	1.00	1.81	1.37	Kurang
Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan	1.20	1.20	1.00	2.74	1.87	Cukup
Pemerintah Kab. Pakpak Bharat	2.60	2.00	1.18	3.06	2.43	Cukup
Pemerintah Kab. Samosir	2.40	2.30	1.00	3.44	2.62	Baik
Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	1.40	1.20	1.00	2.81	1.92	Cukup
Pemerintah Kab. Padang Lawas	1.90	1.00	1.00	2.32	1.72	Kurang
Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara	1.50	1.10	1.00	2.86	1.94	Cukup
Pemerintah Kab. Batubara	2.90	1.10	1.00	3.05	2.21	Cukup
Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan	1.40	1.80	1.09	2.31	1.86*	Cukup
Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara	2.40	2.20	1.82	2.87	2.47*	Cukup
Pemerintah Kab. Nias Barat	1.00	1.00	1.00	2.80	1.82	Cukup
Pemerintah Kab. Nias Utara	1.00	1.00	1.00	2.05	1.48	Kurang
Pemerintah Kota Medan	2.40	2.40	1.00	3.70	2.76*	Baik
Pemerintah Kota Tebing Tinggi	1.30	1.60	1.00	2.86	2.04	Cukup

*) Hasil Evaluasi SPBE 2021

Pemerintah Kota Binjai	1.20	1.10	1.00	2.69	1.82	Cukup
Pemerintah Kota Pematang Siantar	2.60	1.40	1.00	3.30	2.35	Cukup
Pemerintah Kota Tanjung Balai	1.20	1.90	1.36	3.18	2.30	Cukup
Pemerintah Kota Sibolga	1.00	1.20	1.00	2.56	1.76	Kurang
Pemerintah Kota Padangsidimpuan	2.80	1.20	1.00	2.47	1.95	Cukup
Pemerintah Kota Gunung Sitoli	2.90	1.30	1.00	2.51	2.01	Cukup

Tabel 18. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Riau

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi Riau	3.50	2.70	1.36	3.62	3.00	Baik
Pemerintah Kab. Kampar	2.40	1.50	1.00	3.07	2.25	Cukup
Pemerintah Kab. Bengkalis	1.60	1.60	1.45	3.05	2.24	Cukup
Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	1.70	1.50	1.00	3.24	2.24	Cukup
Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	1.90	1.80	1.09	2.81	2.15	Cukup
Pemerintah Kab. Pelalawan	1.30	1.10	1.00	1.70	1.38*	Kurang
Pemerintah Kab. Rokan Hulu	3.00	1.60	1.18	3.13	2.41	Cukup
Pemerintah Kab. Rokan Hilir	1.50	1.80	1.00	2.93	2.15	Cukup
Pemerintah Kab. Siak	1.40	1.40	1.00	3.62	2.34	Cukup
Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	3.30	3.00	1.18	3.49	2.96*	Baik
Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	2.30	2.00	1.27	2.43	2.12	Cukup
Pemerintah Kota Pekanbaru	3.00	2.30	1.00	3.74	2.83	Baik
Pemerintah Kota Dumai	3.00	2.30	1.09	3.32	2.66	Baik

Tabel 19. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Kepulauan Riau

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	2.80	2.50	1.82	3.05	2.68	Baik
Pemerintah Kab. Bintan	2.90	1.90	1.55	2.19	2.10	Cukup
Pemerintah Kab. Karimun	2.70	1.00	1.00	1.86	1.61	Kurang
Pemerintah Kab. Natuna	2.80	2.00	1.27	3.13	2.50	Cukup

*) Hasil Evaluasi SPBE 2021

Pemerintah Kab. Lingga	2.80	1.00	1.00	2.67	1.99	Cukup
Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	1.40	1.80	1.09	2.29	1.85	Cukup
Pemerintah Kota Batam	3.90	2.30	1.09	3.49	2.85	Baik
Pemerintah Kota Tanjungpinang	1.70	1.00	1.00	2.68	1.85	Cukup

Tabel 20. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Sumatera Barat

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	2.80	3.00	1.82	3.87	3.18	Baik
Pemerintah Kab. Agam	1.30	1.30	1.09	3.75	2.38	Cukup
Pemerintah Kab. Pasaman	1.90	1.30	1.09	2.54	1.91	Cukup
Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	2.90	2.60	2.64	4.01	3.29	Baik
Pemerintah Kab. Solok	2.90	2.50	1.45	4.14	3.12	Baik
Pemerintah Kab. Padang Pariaman	2.80	1.50	1.27	3.63	2.60	Baik
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	3.80	2.50	2.18	4.39	3.48	Baik
Pemerintah Kab. Tanah Datar	3.30	2.70	1.73	4.00	3.21	Baik
Pemerintah Kab. Sijunjung	2.20	1.50	1.27	2.94	2.21	Cukup
Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	1.00	1.00	1.00	1.57	1.26	Kurang
Pemerintah Kab. Solok Selatan	2.90	1.80	1.27	2.76	2.29	Cukup
Pemerintah Kab. Dharmasraya	3.10	2.00	1.00	3.01	2.44	Cukup
Pemerintah Kab. Pasaman Barat	3.10	2.10	1.73	2.52	2.36	Cukup
Pemerintah Kota Bukittinggi	1.40	2.00	1.27	3.45	2.46	Cukup
Pemerintah Kota Padang Panjang	2.90	2.20	2.09	3.37	2.81	Baik
Pemerintah Kota Sawahlunto	3.50	2.40	1.00	3.57	2.84	Baik
Pemerintah Kota Solok	1.00	2.80	1.73	3.50	2.71	Baik
Pemerintah Kota Padang	3.50	2.60	1.64	3.58	3.01	Baik
Pemerintah Kota Payakumbuh	2.70	2.80	1.91	3.63	3.02	Baik
Pemerintah Kota Pariaman	2.70	1.90	1.00	3.69	2.67	Baik

Tabel 21. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Jambi

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi Jambi	1.90	1.80	1.00	2.92	2.19	Cukup
Pemerintah Kab. Batang Hari	4.50	2.40	1.45	3.62	3.07	Baik
Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	1.70	1.20	1.00	2.13	1.65	Kurang
Pemerintah Kab. Bungo	1.20	1.00	1.00	2.09	1.52	Kurang
Pemerintah Kab. Merangin	1.10	1.00	1.00	2.25	1.58	Kurang
Pemerintah Kab. Kerinci	1.00	1.10	1.09	2.10	1.54	Kurang
Pemerintah Kab. Sarolangun	3.60	2.50	1.09	2.98	2.63	Baik
Pemerintah Kab. Tebo	2.70	1.30	1.00	2.80	2.11	Cukup
Pemerintah Kab. Muaro Jambi	1.70	1.10	1.00	2.76	1.92	Cukup
Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur	1.20	1.90	1.18	2.99	2.19	Cukup
Pemerintah Kota Jambi	3.40	3.20	1.09	3.06	2.81	Baik
Pemerintah Kota Sungai Penuh	2.80	1.00	1.00	2.61	1.97	Cukup

Tabel 22. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Sumatera Selatan

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	3.00	2.30	1.09	3.24	2.62*	Baik
Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	2.80	2.10	1.09	3.87	2.83	Baik
Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu	2.70	1.90	1.18	3.63	2.67	Baik
Pemerintah Kab. Muara Enim	3.40	2.60	1.00	3.64	2.91	Baik
Pemerintah Kab. Lahat	1.60	1.60	1.00	3.00	2.14	Cukup
Pemerintah Kab. Musi Rawas	2.30	1.20	1.00	2.54	1.92	Cukup
Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	2.00	1.90	1.18	3.20	2.39	Cukup
Pemerintah Kab. Banyuasin	2.00	1.00	1.00	2.61	1.86	Cukup
Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	3.00	1.80	1.09	2.75	2.27	Cukup
Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.	1.40	1.10	1.00	2.87	1.93	Cukup
Pemerintah Kab. Ogan Ilir	3.00	2.50	1.18	2.87	2.52	Cukup

*) Hasil Evaluasi SPBE 2021

Tabel 23. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	3.20	2.70	1.45	3.68	3.01	Baik
Pemerintah Kab. Bangka	2.70	1.00	1.00	2.38	1.85	Cukup
Pemerintah Kab. Belitung	3.40	2.10	1.73	3.88	3.02	Baik
Pemerintah Kab. Bangka Barat	2.90	1.70	1.00	2.94	2.30	Cukup
Pemerintah Kab. Bangka Tengah	3.00	2.80	1.18	3.32	2.80	Baik
Pemerintah Kab. Bangka Selatan	3.90	3.30	2.00	2.96	3.01	Baik
Pemerintah Kab. Belitung Timur	3.00	2.40	1.55	3.19	2.70	Baik
Pemerintah Kota Pangkal Pinang	2.50	1.70	1.00	2.86	2.22	Cukup

Tabel 24. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Bengkulu

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi Bengkulu	4.70	2.20	1.09	3.95	3.14	Baik
Pemerintah Kab. Bengkulu Utara	2.20	1.20	1.00	3.19	2.20	Cukup
Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan	2.90	1.40	1.00	3.18	2.34	Cukup
Pemerintah Kab. Rejang Lebong	4.20	2.00	1.82	3.20	2.80	Baik
Pemerintah Kab. Kaur	2.40	1.00	1.00	1.20	1.27	Kurang
Pemerintah Kab. Seluma	2.70	2.20	2.00	2.94	2.57	Cukup
Pemerintah Kab. Mukomuko	2.10	1.20	1.00	2.91	2.06	Cukup
Pemerintah Kab. Kepahiang	3.00	1.40	1.00	2.70	2.13	Cukup
Pemerintah Kab. Lebong	3.10	1.10	1.00	1.55	1.55	Kurang
Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah	2.60	1.90	1.00	3.05	2.37	Cukup
Pemerintah Kota Bengkulu	2.50	1.30	1.09	3.05	2.22	Cukup

Tabel 25. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Lampung

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi Lampung	4.70	3.30	1.64	3.65	3.37	Baik
Pemerintah Kab. Lampung Selatan	1.60	1.00	1.00	2.37	1.70	Kurang
Pemerintah Kab. Lampung Tengah	2.10	1.40	1.00	2.88	2.10	Cukup
Pemerintah Kab. Lampung Utara	3.00	1.50	1.09	3.25	2.43	Cukup
Pemerintah Kab. Lampung Barat	3.10	1.50	1.09	2.86	2.26	Cukup
Pemerintah Kab. Tulang Bawang	2.50	1.40	1.00	2.81	2.12	Cukup
Pemerintah Kab. Tanggamus	2.30	1.00	1.00	2.01	1.63	Kurang
Pemerintah Kab. Way Kanan	1.40	1.80	1.45	3.01	2.24	Cukup
Pemerintah Kab. Lampung Timur	1.10	1.00	1.00	2.94	1.90	Cukup
Pemerintah Kab. Pesawaran	2.80	1.30	1.00	2.47	1.98	Cukup
Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat	3.00	1.70	1.09	2.42	2.10	Cukup
Pemerintah Kab. Pringsewu	1.60	1.60	1.00	2.69	2.00	Cukup
Pemerintah Kab. Mesuji	4.00	1.70	1.00	3.25	2.59	Cukup
Pemerintah Kab. Pesisir Barat	2.40	1.20	1.00	2.61	1.96	Cukup
Pemerintah Kota Metro	1.60	2.10	1.64	3.26	2.49	Cukup
Pemerintah Kota Bandar Lampung	2.00	1.00	1.00	1.88	1.53	Kurang

Tabel 26. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah DKI Jakarta

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	3.40	3.20	2.45	4.45	3.67	Sangat Baik

Tabel 27. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Jawa Barat

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	3.00	3.30	1.00	4.38	3.37	Baik
Pemerintah Kab. Bogor	4.00	2.80	2.64	3.69	3.33	Baik

Pemerintah Kab. Sukabumi	2.60	1.90	1.00	2.88	2.29	Cukup
Pemerintah Kab. Cianjur	3.50	1.40	1.00	3.07	2.37	Cukup
Pemerintah Kab. Bekasi	1.20	1.40	1.09	2.31	1.74	Kurang
Pemerintah Kab. Karawang	3.20	2.50	1.09	4.08	3.08	Baik
Pemerintah Kab. Purwakarta	2.80	1.30	1.36	3.00	2.28	Cukup
Pemerintah Kab. Subang	2.50	2.00	1.18	2.93	2.35	Cukup
Pemerintah Kab. Bandung	3.00	2.80	1.27	3.39	2.84	Baik
Pemerintah Kab. Sumedang	4.70	2.60	3.55	4.38	3.84	Sangat Baik
Pemerintah Kab. Garut	4.70	3.00	2.00	3.43	3.25	Baik
Pemerintah Kab. Tasikmalaya	3.10	1.60	1.00	3.54	2.58	Cukup
Pemerintah Kab. Ciamis	3.90	2.00	1.09	3.19	2.64	Baik
Pemerintah Kab. Cirebon	1.70	2.70	2.27	3.05	2.66	Baik
Pemerintah Kab. Kuningan	3.70	2.20	1.36	3.57	2.88	Baik
Pemerintah Kab. Indramayu	3.60	3.00	2.73	3.13	3.09	Baik
Pemerintah Kab. Majalengka	3.50	2.50	2.09	3.05	2.82*	Baik
Pemerintah Kab. Bandung Barat	2.30	2.00	1.73	3.45	2.65	Baik
Pemerintah Kab. Pangandaran	4.70	2.00	1.18	3.39	2.85	Baik
Pemerintah Kota Bandung	4.10	3.00	2.55	4.20	3.61	Sangat Baik
Pemerintah Kota Bogor	3.50	2.30	1.09	3.38	2.75	Baik
Pemerintah Kota Sukabumi	3.00	2.70	2.27	3.38	2.98*	Baik
Pemerintah Kota Cirebon	3.00	2.40	2.82	3.76	3.17	Baik
Pemerintah Kota Bekasi	3.00	2.30	1.00	3.69	2.81	Baik
Pemerintah Kota Depok	4.70	2.90	2.45	3.70	3.42	Baik
Pemerintah Kota Cimahi	1.90	3.30	2.18	3.64	3.09	Baik
Pemerintah Kota Tasikmalaya	3.20	2.00	1.36	3.25	2.62	Baik
Pemerintah Kota Banjar	1.80	1.90	1.00	3.32	2.38	Cukup

*) Hasil Evaluasi SPBE 2021

Tabel 28. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Banten

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi Banten	2.80	2.80	1.91	3.63	3.03	Baik
Pemerintah Kab. Serang	3.20	1.90	1.64	3.25	2.64	Baik
Pemerintah Kab. Pandeglang	2.80	1.60	1.18	3.38	2.50	Cukup
Pemerintah Kab. Lebak	3.10	2.10	1.36	3.24	2.63	Baik
Pemerintah Kab. Tangerang	2.20	2.40	1.27	3.44	2.66	Baik
Pemerintah Kota Tangerang	2.30	1.70	1.00	3.75	2.60	Baik
Pemerintah Kota Cilegon	2.40	1.00	1.09	2.78	2.01	Cukup
Pemerintah Kota Serang	2.20	1.90	1.00	3.44	2.49	Cukup
Pemerintah Kota Tangerang Selatan	1.80	2.40	1.00	3.38	2.54	Cukup

Tabel 29. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah D. I Yogyakarta

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Pemerintah D.I. Yogyakarta	2.50	2.30	1.82	3.99	3.02	Baik
Pemerintah Kab. Bantul	4.40	2.90	2.36	4.26	3.62*	Sangat Baik
Pemerintah Kab. Sleman	3.30	2.40	1.55	4.19	3.19	Baik
Pemerintah Kab. Gunungkidul	2.80	2.60	1.45	2.99	2.62	Baik
Pemerintah Kab. Kulon Progo	3.50	3.70	1.00	3.69	3.23*	Baik
Pemerintah Kota Yogyakarta	1.60	2.80	1.00	4.19	2.98*	Baik

Tabel 30. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Jawa Tengah

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	3.30	2.60	2.82	3.94	3.34	Baik
Pemerintah Kab. Semarang	2.00	1.60	1.00	2.86	2.13	Cukup
Pemerintah Kab. Kendal	3.00	2.80	1.27	3.57	2.93	Baik
Pemerintah Kab. Demak	3.50	3.10	1.36	3.82	3.19*	Baik
Pemerintah Kab. Grobogan	4.00	3.20	1.55	3.94	3.37	Baik

*) Hasil Evaluasi SPBE 2021

Pemerintah Kab. Pekalongan	2.80	2.20	1.36	3.25	2.62	Baik
Pemerintah Kab. Batang	2.50	2.40	1.00	3.87	2.85	Baik
Pemerintah Kab. Tegal	3.50	2.50	1.73	3.81	3.10	Baik
Pemerintah Kab. Brebes	1.90	1.60	1.00	3.50	2.40	Cukup
Pemerintah Kab. Pati	2.80	2.30	1.00	3.62	2.75*	Baik
Pemerintah Kab. Kudus	3.90	3.00	2.36	3.82	3.38	Baik
Pemerintah Kab. Pemalang	2.20	2.20	1.00	2.70	2.23	Cukup
Pemerintah Kab. Jepara	3.80	2.60	1.73	3.76	3.14	Baik
Pemerintah Kab. Rembang	3.40	2.70	2.55	3.63	3.19	Baik
Pemerintah Kab. Blora	1.70	1.70	1.00	3.46	2.38	Cukup
Pemerintah Kab. Banyumas	3.00	1.90	1.00	3.45	2.60	Baik
Pemerintah Kab. Cilacap	4.30	2.10	1.00	3.56	2.87	Baik
Pemerintah Kab. Purbalingga	3.20	2.80	2.64	3.69	3.23	Baik
Pemerintah Kab. Banjarnegara	4.20	2.40	1.55	3.20	2.86	Baik
Pemerintah Kab. Magelang	4.90	2.40	1.09	3.76	3.13	Baik
Pemerintah Kab. Temanggung	2.70	2.50	1.27	3.50	2.78*	Baik
Pemerintah Kab. Wonosobo	2.90	2.20	1.45	3.81	2.90	Baik
Pemerintah Kab. Purworejo	2.00	2.50	1.73	3.57	2.80	Baik
Pemerintah Kab. Kebumen	3.30	3.40	1.00	4.39	3.44	Baik
Pemerintah Kab. Klaten	3.20	2.70	1.00	3.25	2.74*	Baik
Pemerintah Kab. Boyolali	3.20	2.70	1.00	3.43	2.82*	Baik
Pemerintah Kab. Sragen	3.10	2.40	2.00	3.93	3.12	Baik
Pemerintah Kab. Sukoharjo	4.00	2.70	2.45	4.01	3.42	Baik
Pemerintah Kab. Karanganyar	3.90	3.10	1.64	3.88	3.32	Baik
Pemerintah Kab. Wonogiri	2.40	3.40	1.27	4.33	3.34	Baik
Pemerintah Kota Semarang	5.00	3.30	2.64	3.23	3.38	Baik
Pemerintah Kota Salatiga	2.30	3.00	1.00	3.63	2.86	Baik
Pemerintah Kota Pekalongan	2.80	2.10	1.36	3.75	2.82*	Baik
Pemerintah Kota Tegal	4.20	2.60	1.00	3.70	3.05	Baik

*) Hasil Evaluasi SPBE 2021

Pemerintah Kota Magelang	2.50	3.00	1.27	3.04	2.67	Baik
Pemerintah Kota Surakarta	5.00	3.00	2.36	4.31	3.75	Sangat Baik

Tabel 31. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Jawa Timur

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	3.30	2.50	1.55	4.38	3.30	Baik
Pemerintah Kab. Gresik	3.70	2.80	2.00	3.86	3.27	Baik
Pemerintah Kab. Mojokerto	3.90	2.00	2.00	3.07	2.73	Baik
Pemerintah Kab. Sidoarjo	1.10	1.70	1.27	3.32	2.29	Cukup
Pemerintah Kab. Jombang	2.90	2.00	1.55	4.08	2.99	Baik
Pemerintah Kab. Sampang	3.00	1.70	1.00	3.45	2.55	Cukup
Pemerintah Kab. Pamekasan	1.80	1.60	1.00	2.87	2.10	Cukup
Pemerintah Kab. Sumenep	1.80	1.40	1.09	2.82	2.05	Cukup
Pemerintah Kab. Bangkalan	2.00	1.30	1.00	2.49	1.89	Cukup
Pemerintah Kab. Bondowoso	1.90	1.90	1.27	2.85	2.23	Cukup
Pemerintah Kab. Situbondo	3.70	2.30	1.36	4.19	3.19	Baik
Pemerintah Kab. Banyuwangi	3.10	2.60	2.55	4.51	3.53*	Sangat Baik
Pemerintah Kab. Jember	1.70	1.50	1.18	2.63	1.99	Cukup
Pemerintah Kab. Malang	1.20	1.80	1.18	3.12	2.22	Cukup
Pemerintah Kab. Pasuruan	2.10	1.50	1.00	2.70	2.04	Cukup
Pemerintah Kab. Probolinggo	2.70	1.70	1.00	3.24	2.42	Cukup
Pemerintah Kab. Lumajang	1.60	1.70	1.00	4.01	2.62	Baik
Pemerintah Kab. Kediri	2.70	1.60	1.09	3.69	2.61	Baik
Pemerintah Kab. Tulungagung	1.50	1.70	1.00	3.50	2.38	Cukup
Pemerintah Kab. Nganjuk	2.40	1.60	1.00	2.87	2.18	Cukup
Pemerintah Kab. Trenggalek	3.00	1.90	1.82	3.11	2.58	Cukup
Pemerintah Kab. Blitar	2.10	2.30	1.00	3.51	2.61	Baik
Pemerintah Kab. Madiun	3.60	3.20	2.09	3.50	3.21*	Baik

*) Hasil Evaluasi SPBE 2021

Pemerintah Kab. Ngawi	3.50	2.00	1.82	3.07	2.65*	Baik
Pemerintah Kab. Magetan	1.80	1.80	1.00	3.13	2.27	Cukup
Pemerintah Kab. Ponorogo	1.90	1.60	1.00	3.31	2.32	Cukup
Pemerintah Kab. Pacitan	2.90	1.60	1.00	3.07	2.34	Cukup
Pemerintah Kab. Bojonegoro	3.10	2.00	1.45	3.36	2.67	Baik
Pemerintah Kab. Tuban	3.00	1.70	1.27	2.85	2.32	Cukup
Pemerintah Kab. Lamongan	2.90	2.20	1.82	3.49	2.82	Baik
Pemerintah Kota Surabaya	3.80	3.20	2.00	4.60	3.72	Sangat Baik
Pemerintah Kota Mojokerto	4.30	2.80	1.91	3.83	3.32	Baik
Pemerintah Kota Malang	2.50	1.90	1.09	3.56	2.60	Baik
Pemerintah Kota Pasuruan	3.00	2.00	1.27	3.43	2.66	Baik
Pemerintah Kota Probolinggo	2.30	1.30	1.00	2.60	1.97	Cukup
Pemerintah Kota Blitar	2.40	2.00	1.91	3.69	2.81	Baik
Pemerintah Kota Kediri	3.00	2.30	1.55	3.83	2.96	Baik
Pemerintah Kota Madiun	3.20	2.20	2.18	3.37	2.86	Baik
Pemerintah Kota Batu	1.70	2.10	1.45	3.19	2.44	Cukup

Tabel 32. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Kalimantan Barat

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	3.40	3.00	1.91	4.32	3.47	Baik
Pemerintah Kab. Sambas	3.20	1.60	1.18	3.13	2.44	Cukup
Pemerintah Kab. Sanggau	2.80	2.70	2.18	3.26	2.88	Baik
Pemerintah Kab. Sintang	1.00	1.00	1.00	1.06	1.03	Kurang
Pemerintah Kab. Mempawah	1.60	1.90	1.45	3.70	2.61	Baik
Pemerintah Kab. Kapuas Hulu	2.90	2.20	1.45	3.50	2.76	Baik
Pemerintah Kab. Ketapang	1.60	1.90	1.18	2.27	1.91	Cukup
Pemerintah Kab. Bengkayang	2.50	1.50	1.00	2.20	1.87	Cukup
Pemerintah Kab. Landak	2.00	1.90	1.27	2.61	2.13	Cukup
Pemerintah Kab. Melawi	2.20	1.00	1.00	1.25	1.27	Kurang

Pemerintah Kab. Sekadau	2.80	1.70	1.00	3.31	2.46	Cukup
Pemerintah Kab. Kubu Raya	2.80	2.90	1.36	2.25	2.34	Cukup
Pemerintah Kab. Kayong Utara	1.30	1.10	1.00	2.79	1.88	Cukup
Pemerintah Kota Pontianak	3.20	3.10	2.45	3.69	3.28	Baik
Pemerintah Kota Singkawang	3.60	2.30	1.64	2.82	2.60*	Baik

Tabel 33. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Kalimantan Tengah

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	1.00	1.20	1.00	2.87	1.90	Cukup
Pemerintah Kab. Kapuas	1.10	1.30	1.00	2.69	1.86	Cukup
Pemerintah Kab. Barito Utara	1.00	1.20	1.00	1.81	1.42	Kurang
Pemerintah Kab. Barito Selatan	2.30	1.50	1.00	3.36	2.37	Cukup
Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur	3.00	1.50	1.00	3.18	2.38	Cukup
Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	2.00	1.40	1.09	2.99	2.15	Cukup
Pemerintah Kab. Pulang Pisau	1.50	1.40	1.09	2.00	1.64	Kurang
Pemerintah Kab. Gunung Mas	1.20	1.10	1.00	3.12	2.01	Cukup
Pemerintah Kab. Lamandau	1.90	1.40	1.00	3.05	2.15	Cukup
Pemerintah Kab. Sukamara	1.20	1.70	1.27	2.30	1.84	Cukup
Pemerintah Kab. Murung Raya	1.30	1.20	1.00	2.55	1.80	Kurang
Pemerintah Kab. Katingan	2.70	1.60	1.00	2.93	2.25	Cukup
Pemerintah Kab. Seruyan	1.20	1.00	1.00	1.77	1.38	Kurang
Pemerintah Kab. Barito Timur	1.00	1.00	1.00	2.55	1.71	Kurang
Pemerintah Kota Palangka Raya	3.00	2.20	1.27	3.31	2.66	Baik

*) Hasil Evaluasi SPBE 2021

Tabel 34. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Kalimantan Selatan

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	2.00	2.00	1.18	3.62	2.60	Baik
Pemerintah Kab. Banjar	1.70	1.90	1.64	3.50	2.56	Cukup
Pemerintah Kab. Tanah Laut	3.00	3.40	2.45	3.21	3.11	Baik
Pemerintah Kab. Tapin	3.20	1.30	1.00	3.04	2.29	Cukup
Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	2.30	1.40	1.00	3.43	2.38	Cukup
Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	2.00	2.10	1.18	3.75	2.69	Baik
Pemerintah Kab. Barito Kuala	2.50	1.80	1.36	3.50	2.59	Cukup
Pemerintah Kab. Tabalong	2.80	1.90	1.00	2.20	2.00	Cukup
Pemerintah Kab. Kotabaru	1.60	1.10	1.00	3.05	2.04	Cukup
Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	1.50	1.40	1.00	2.36	1.78	Kurang
Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	2.90	3.00	2.64	3.51	3.16	Baik
Pemerintah Kab. Balangan	2.70	2.00	1.00	3.19	2.47	Cukup
Pemerintah Kota Banjarmasin	3.30	3.30	1.36	4.08	3.33	Baik
Pemerintah Kota Banjarbaru	2.60	1.90	1.00	2.88	2.29	Cukup

Tabel 35. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Kalimantan Timur

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	1.40	1.70	1.00	2.95	2.11	Cukup
Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	1.30	1.50	1.00	2.71	1.94	Cukup
Pemerintah Kab. Paser	1.80	1.90	1.00	2.81	2.15	Cukup
Pemerintah Kab. Berau	2.90	1.70	1.09	2.24	2.00	Cukup
Pemerintah Kab. Kutai Barat	1.80	1.10	1.00	2.51	1.81	Cukup
Pemerintah Kab. Kutai Timur	3.00	2.10	1.18	3.76	2.82	Baik
Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	1.50	1.20	1.00	2.55	1.82	Cukup
Pemerintah Kab. Mahakam Ulu	1.00	1.10	1.00	1.00	1.03*	Kurang
Pemerintah Kota Samarinda	1.90	1.50	1.36	3.49	2.44	Cukup
Pemerintah Kota Balikpapan	3.10	2.60	1.55	3.82	3.05	Baik
Pemerintah Kota Bontang	2.90	2.20	1.27	3.44	2.70	Baik

*) Hasil Evaluasi SPBE 2021

Tabel 36. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Kalimantan Utara

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	1.30	2.00	1.09	2.48	1.98	Cukup
Pemerintah Kab. Bulungan	2.70	1.50	1.27	3.04	2.32	Cukup
Pemerintah Kab. Malinau	1.80	1.00	1.00	3.06	2.04	Cukup
Pemerintah Kab. Nunukan	1.80	1.80	1.00	3.37	2.38	Cukup
Pemerintah Kab. Tana Tidung	1.10	1.20	1.00	3.25	2.09	Cukup
Pemerintah Kota Tarakan	2.20	1.30	1.00	2.93	2.11	Cukup

Tabel 37. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Sulawesi Utara

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	1.30	1.80	1.09	3.31	2.31	Cukup
Pemerintah Kab. Minahasa	2.40	1.00	1.00	2.43	1.83	Cukup
Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow	2.80	3.10	3.00	2.43	2.74	Baik
Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe	1.20	1.20	1.00	2.32	1.68	Kurang
Pemerintah Kab. Minahasa Selatan	1.00	1.30	1.00	2.29	1.66	Kurang
Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud	2.80	1.70	1.00	2.50	2.09	Cukup
Pemerintah Kab. Minahasa Utara	1.70	1.00	1.00	1.93	1.51	Kurang
Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara	1.60	1.50	1.45	2.73	2.07	Cukup
Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro	2.10	1.20	1.00	2.61	1.93	Cukup
Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara	2.60	1.70	1.27	2.74	2.22	Cukup
Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1.70	2.10	1.64	2.48	2.15	Cukup
Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur	1.60	1.00	1.00	3.18	2.07	Cukup
Pemerintah Kota Manado	1.90	1.10	1.00	2.54	1.84	Cukup
Pemerintah Kota Bitung	3.00	2.40	1.82	2.81	2.57	Cukup
Pemerintah Kota Tomohon	1.00	1.70	1.27	2.18	1.76	Kurang
Pemerintah Kota KotaMabagu	1.50	1.40	1.00	3.38	2.25	Cukup

Tabel 38. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Gorontalo

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi Gorontalo	3.10	1.50	1.00	3.37	2.48	Cukup
Pemerintah Kab. Gorontalo	2.30	1.40	1.00	2.74	2.06	Cukup
Pemerintah Kab. Boalemo	1.10	1.30	1.00	3.11	2.05	Cukup
Pemerintah Kab. Pohuwato	2.00	1.50	1.00	2.82	2.08	Cukup
Pemerintah Kab. Bone Bolango	3.00	1.30	1.00	3.11	2.30	Cukup
Pemerintah Kab. Gorontalo Utara	3.00	1.30	1.00	1.46	1.55	Kurang
Pemerintah Kota Gorontalo	3.10	1.70	1.00	3.51	2.59	Cukup

Tabel 39. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Sulawesi Tengah

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	1.70	1.70	1.00	3.25	2.29	Cukup
Pemerintah Kab. Poso	1.20	1.20	1.00	2.62	1.81	Cukup
Pemerintah Kab. Donggala	1.30	1.00	1.00	1.80	1.40	Kurang
Pemerintah Kab. Tolitoli	1.00	1.50	1.00	2.23	1.69	Kurang
Pemerintah Kab. Banggai	3.00	1.30	1.00	2.62	2.07	Cukup
Pemerintah Kab. Buol	2.90	1.40	1.00	2.62	2.08	Cukup
Pemerintah Kab. Morowali	1.30	1.30	1.00	2.87	1.97	Cukup
Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan	3.00	1.20	1.00	2.60	2.04	Cukup
Pemerintah Kab. Parigi Moutong	1.00	1.00	1.00	2.18	1.54	Kurang
Pemerintah Kab. Tojo Una Una	1.20	1.00	1.00	1.00	1.03	Kurang
Pemerintah Kab. Sigi	1.90	1.20	1.00	2.69	1.93	Cukup
Pemerintah Kab. Banggai Laut	2.70	1.00	1.00	1.00	1.22	Kurang
Pemerintah Kab. Morowali Utara	1.00	1.10	1.00	2.47	1.69	Kurang
Pemerintah Kota Palu	2.90	1.40	1.09	1.93	1.78	Kurang

Tabel 40. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Sulawesi Selatan

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	2.20	2.10	1.73	2.81	2.37	Cukup
Pemerintah Kab. Pinrang	2.50	2.40	1.00	3.36	2.62*	Baik
Pemerintah Kab. Gowa	1.10	1.00	1.00	1.76	1.36*	Kurang
Pemerintah Kab. Wajo	2.80	1.80	1.18	3.37	2.54	Cukup
Pemerintah Kab. Bone	2.70	1.60	1.00	2.62	2.11	Cukup
Pemerintah Kab. Tana Toraja	2.30	1.20	1.00	1.88	1.62	Kurang
Pemerintah Kab. Maros	2.50	1.60	1.00	2.59	2.07	Cukup
Pemerintah Kab. Luwu	2.20	1.60	1.09	3.07	2.26	Cukup
Pemerintah Kab. Sinjai	1.60	2.00	1.00	2.62	2.07	Cukup
Pemerintah Kab. Bulukumba	1.40	1.10	1.00	2.62	1.81	Cukup
Pemerintah Kab. Bantaeng	2.80	1.50	1.00	3.04	2.29	Cukup
Pemerintah Kab. Jeneponto	2.70	1.50	1.09	2.75	2.16	Cukup
Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar	1.10	1.20	1.00	2.69	1.83	Cukup
Pemerintah Kab. Takalar	1.00	1.00	1.00	3.18	1.99	Cukup
Pemerintah Kab. Barru	1.10	1.20	1.00	3.19	2.06	Cukup
Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang	3.00	1.50	1.00	3.05	2.32	Cukup
Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2.90	1.20	1.00	2.81	2.12	Cukup
Pemerintah Kab. Soppeng	3.00	2.10	1.00	3.49	2.67	Baik
Pemerintah Kab. Enrekang	2.60	2.30	1.55	3.25	2.65	Baik
Pemerintah Kab. Luwu Utara	3.10	2.30	2.18	3.51	2.93	Baik
Pemerintah Kab. Luwu Timur	1.70	1.80	1.09	3.51	2.45	Cukup
Pemerintah Kab. Toraja Utara	1.00	1.10	1.00	2.64	1.77	Kurang
Pemerintah Kota Makassar	3.00	1.90	1.18	3.06	2.45	Cukup
Pemerintah Kota Parepare	2.90	1.60	1.00	3.43	2.50	Cukup
Pemerintah Kota Palopo	3.40	2.20	1.55	3.63	2.90	Baik

*) Hasil Evaluasi SPBE 2021

Tabel 41. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Sulawesi Tenggara

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	2.20	1.40	1.00	2.12	1.77	Kurang
Pemerintah Kab. Konawe	1.70	1.40	1.00	2.18	1.73	Kurang
Pemerintah Kab. Buton	1.60	1.20	1.00	2.21	1.68	Kurang
Pemerintah Kab. Muna	1.00	1.00	1.00	1.89	1.41	Kurang
Pemerintah Kab. Kolaka	4.60	2.50	2.36	3.37	3.15	Baik
Pemerintah Kab. Konawe Selatan	2.50	1.10	1.09	2.76	2.04	Cukup
Pemerintah Kab. Kolaka Utara	1.00	1.30	1.00	2.74	1.87	Cukup
Pemerintah Kab. Bombana	2.60	1.30	1.00	2.80	2.10	Cukup
Pemerintah Kab. Wakatobi	1.50	1.00	1.00	1.50	1.29	Kurang
Pemerintah Kab. Buton Utara	1.00	1.20	1.00	3.19	2.05	Cukup
Pemerintah Kab. Konawe Utara	2.00	1.10	1.00	2.06	1.64	Kurang
Pemerintah Kab. Kolaka Timur	1.20	1.00	1.00	1.66	1.33	Kurang
Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan	1.00	1.00	1.00	3.13	1.97	Cukup
Pemerintah Kab. Buton Selatan	1.70	1.00	1.00	1.00	1.09*	Kurang
Pemerintah Kab. Buton Tengah	2.60	1.60	1.18	3.43	2.50	Cukup
Pemerintah Kab. Muna Barat	1.00	1.00	1.00	2.17	1.53	Kurang
Pemerintah Kota Kendari	2.50	1.10	1.00	2.81	2.04	Cukup
Pemerintah Kota Baubau	1.00	1.00	1.09	1.79	1.38	Kurang

Tabel 42. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Sulawesi Barat

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	1.60	1.70	1.00	3.31	2.31	Cukup
Pemerintah Kab. Pasangkayu	1.00	1.00	1.00	1.25	1.11	Kurang
Pemerintah Kab. Mamuju	1.20	1.20	1.00	2.87	1.93	Cukup
Pemerintah Kab. Mamasa	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Kurang
Pemerintah Kab. Polewali Mandar	3.90	2.50	3.82	4.01	3.58	Sangat Baik

*) Hasil Evaluasi SPBE 2021

Pemerintah Kab. Majene	2.70	2.00	1.36	3.31	2.58	Cukup
Pemerintah Kab. Mamuju Tengah	2.90	1.20	1.00	2.23	1.86	Cukup

Tabel 43. SPBE Pemerintah Daerah di Bali

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi Bali	3.20	4.00	3.36	3.76	3.68*	Sangat Baik
Pemerintah Kab. Buleleng	2.80	3.00	1.09	3.88	3.06	Baik
Pemerintah Kab. Jembrana	3.00	2.40	1.27	3.43	2.76	Baik
Pemerintah Kab. Klungkung	2.20	2.30	1.64	4.13	3.01*	Baik
Pemerintah Kab. Gianyar	2.00	2.60	1.36	3.51	2.73*	Baik
Pemerintah Kab. Karangasem	2.30	2.00	1.00	2.63	2.16	Cukup
Pemerintah Kab. Bangli	2.20	1.70	1.18	3.02	2.28	Cukup
Pemerintah Kab. Badung	3.00	2.10	1.00	3.13	2.50	Cukup
Pemerintah Kab. Tabanan	4.90	1.90	1.09	3.18	2.74	Baik
Pemerintah Kota Denpasar	5.00	3.40	3.18	3.64	3.68	Sangat Baik

Tabel 44. SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi NTB	3.10	2.80	1.91	4.01	3.24	Baik
Pemerintah Kab. Lombok Barat	2.70	2.30	1.18	3.30	2.62	Baik
Pemerintah Kab. Lombok Tengah	3.00	1.70	1.00	2.42	2.08	Cukup
Pemerintah Kab. Lombok Timur	2.60	1.30	1.00	2.44	1.94	Cukup
Pemerintah Kab. Bima	1.00	1.00	1.00	1.80	1.36	Kurang
Pemerintah Kab. Sumbawa	2.30	2.40	1.00	2.62	2.26	Cukup
Pemerintah Kab. Dompu	1.00	1.00	1.00	1.44	1.20	Kurang
Pemerintah Kab. Sumbawa Barat	2.90	2.00	2.18	3.13	2.66	Baik
Pemerintah Kab. Lombok Utara	2.90	1.50	1.18	3.19	2.40	Cukup

*) Hasil Evaluasi SPBE 2021

Pemerintah Kota Mataram	3.90	2.70	2.91	3.30	3.16	Baik
Pemerintah Kota Bima	1.90	1.70	1.00	2.36	1.91	Cukup

Tabel 45. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Nusa Tenggara Timur

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi NTT	4.70	2.60	3.00	3.50	3.35	Baik
Pemerintah Kab. Kupang	1.20	1.10	1.00	2.75	1.85	Cukup
Pemerintah Kab. Belu	3.00	1.00	1.00	2.51	1.95	Cukup
Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	1.20	1.50	1.00	1.18	1.23	Kurang
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan	2.80	1.70	1.18	3.57	2.61	Baik
Pemerintah Kab. Alor	1.20	1.10	1.00	2.73	1.84	Cukup
Pemerintah Kab. Sikka	1.00	1.00	1.00	2.87	1.85	Cukup
Pemerintah Kab. Flores Timur	1.10	1.00	1.00	2.18	1.55	Kurang
Pemerintah Kab. Ende	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00*	Kurang
Pemerintah Kab. Ngada	1.00	1.00	1.00	1.75	1.34	Kurang
Pemerintah Kab. Manggarai	1.20	1.00	1.00	2.67	1.79	Kurang
Pemerintah Kab. Sumba Timur	2.90	1.40	1.00	3.12	2.31	Cukup
Pemerintah Kab. Sumba Barat	1.20	1.50	1.09	3.37	2.25	Cukup
Pemerintah Kab. Lembata	1.20	1.10	1.00	2.43	1.70	Kurang
Pemerintah Kab. Rote Ndao	3.20	2.00	1.18	3.08	2.51	Cukup
Pemerintah Kab. Manggarai Barat	4.40	2.60	2.09	3.18	3.01	Baik
Pemerintah Kab. Manggarai Timur	3.00	1.70	1.00	3.31	2.49	Cukup
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	1.10	1.10	1.00	1.68	1.35	Kurang
Pemerintah Kab. Nagekeo	1.00	1.00	1.00	1.31	1.14	Kurang
Pemerintah Kab. Sumba Tengah	1.00	1.00	1.00	1.60	1.28	Kurang
Pemerintah Kab. Sabu Raijua	3.10	1.40	1.00	2.75	2.17	Cukup
Pemerintah Kab. Malaka	2.90	1.20	1.00	2.53	1.99	Cukup
Pemerintah Kota Kupang	2.70	1.60	1.00	2.55	2.08	Cukup

*) Hasil Evaluasi SPBE 2021

Tabel 46. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Maluku

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi Maluku	2.20	1.30	1.00	3.25	2.25	Cukup
Pemerintah Kab. Maluku Tengah	1.70	1.00	1.00	1.18	1.17	Kurang
Pemerintah Kab. Maluku Tenggara	2.20	1.00	1.00	2.73	1.94	Cukup
Pemerintah Kab. Buru	1.00	1.00	1.00	1.80	1.37	Kurang
Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	2.00	1.80	1.55	2.31	2.02	Cukup
Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat	1.00	1.30	1.00	2.48	1.75	Kurang
Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur	1.00	1.00	1.00	1.81	1.37	Kurang
Pemerintah Kab. Buru Selatan	1.00	1.00	1.00	1.37	1.17	Kurang
Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya	1.20	1.10	1.00	2.74	1.84	Cukup
Pemerintah Kota Ambon	2.80	1.30	1.00	3.11	2.27	Cukup
Pemerintah Kota Tual	1.00	1.00	1.00	3.31	2.05	Cukup

Tabel 47. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Maluku Utara

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi Maluku Utara	2.90	1.90	1.36	3.12	2.50	Cukup
Pemerintah Kab. Halmahera Barat	1.00	1.00	1.00	1.73	1.33	Kurang
Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	1.50	1.30	1.00	2.34	1.75	Kurang
Pemerintah Kab. Halmahera Utara	3.10	1.70	1.00	3.00	2.36	Cukup
Pemerintah Kab. Pulau Morotai	1.00	1.10	1.00	1.92	1.44	Kurang
Pemerintah Kab. Pulau Taliabu	1.00	1.20	1.00	2.16	1.58	Kurang
Pemerintah Kota Ternate	1.00	1.00	1.00	1.13	1.06	Kurang
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan	1.10	1.00	1.00	2.53	1.71	Kurang

Tabel 48. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Papua Barat

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi Papua Barat	1.90	1.40	1.00	2.94	2.10	Cukup
Pemerintah Kab. Sorong	3.00	1.00	1.00	2.81	2.09	Cukup
Pemerintah Kab. Sorong Selatan	1.00	1.00	1.00	1.45	1.20*	Kurang
Pemerintah Kab. Raja Ampat	1.00	1.00	1.00	1.49	1.22*	Kurang
Pemerintah Kab. Manokwari	2.80	1.10	1.00	1.76	1.60	Kurang
Pemerintah Kab. Teluk Wondama	1.00	1.00	1.00	2.17	1.53*	Kurang
Pemerintah Kab. Fak-Fak	2.10	1.00	1.00	1.86	1.53	Kurang
Pemerintah Kab. Kaimana	1.00	1.00	1.09	1.37	1.18	Kurang
Pemerintah Kab. Tambrauw	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00*	Kurang
Pemerintah Kab. Maybrat	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00*	Kurang
Pemerintah Kab. Manokwari Selatan	1.00	1.00	1.00	1.91	1.42	Kurang
Pemerintah Kota Sorong	1.20	1.20	1.00	2.48	1.75	Kurang

Tabel 49. Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Papua

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi Papua	1.60	1.00	1.00	2.75	1.88	Cukup
Pemerintah Kab. Jayapura	2.70	2.40	1.64	3.05	2.61	Baik
Pemerintah Kab. Biak Numfor	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00*	Kurang
Pemerintah Kab. Merauke	1.00	1.00	1.00	1.12	1.06	Kurang
Pemerintah Kab. Jayawijaya	1.90	1.20	1.00	1.76	1.51	Kurang
Pemerintah Kab. Nabire	1.10	1.00	1.00	2.04	1.49	Kurang
Pemerintah Kab. Puncak Jaya	1.00	1.10	1.09	2.31	1.64	Kurang
Pemerintah Kab. Mimika	1.00	1.10	1.36	2.69	1.86	Cukup
Pemerintah Kab. Boven Digoel	1.80	1.30	1.00	1.42	1.37	Kurang
Pemerintah Kab. Mappi	1.00	1.00	1.00	2.36	1.62	Kurang
Pemerintah Kab. Yahukimo	1.00	1.00	1.00	1.13	1.06	Kurang
Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Kurang

*) Hasil Evaluasi SPBE 2021

Pemerintah Kab. Keerom	1.00	1.00	1.00	1.86	1.39	Kurang
Pemerintah Kab. Supiori	1.00	1.00	1.00	1.98	1.45	Kurang
Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah	1.00	1.00	1.00	1.99	1.45	Kurang
Pemerintah Kab. Lanny Jaya	1.00	1.00	1.00	1.18	1.08	Kurang
Pemerintah Kab. Intan Jaya	1.00	1.00	1.00	1.18	1.08	Kurang
Pemerintah Kota Jayapura	1.10	1.30	1.00	2.73	1.88	Cukup



Penutup

A. Kesimpulan

Bergerak untuk reformasi birokrasi yang berdampak. Melakukan transformasi dalam peningkatan tata kelola digitalisasi pemerintahan menjadi satu pendekatan pemerintah paling konkrit di era saat ini, sehingga aktivitas di lingkungan birokrasi melalui kegiatan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik harus berdampak langsung terhadap masyarakat. Penerapan SPBE sebagai kerangka kerja yang komprehensif menjadi penting untuk memastikan pondasi tata kelola digitalisasi pemerintahan dapat berjalan efektif, efisien, terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam pelaksanaannya, sehingga layanan untuk mendukung tugas dan fungsi dalam layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang diterapkan akan optimal dalam pemanfaatannya. Selain mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE, pemantauan dan evaluasi SPBE dalam hal ini memberikan gambaran isu-isu dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan SPBE. Secara umum, berikut tantangan penerapan SPBE saat ini, antara lain:

a) Suprastruktur SPBE

Masih rendahnya komitmen para Pimpinan, khususnya di daerah untuk menjalankan kegiatan yang tidak sesuai dengan program Kepala Daerah (political will), sehingga menjadi hambatan bagi jajaran di bawah untuk bergerak mendorong peningkatan penerapan SPBE. Hal tersebut juga berdampak terhadap inisiatif untuk memiliki suatu kebijakan dalam penerapan SPBE secara internal di lingkungan Instansi, sehingga dengan belum adanya penguatan kerangka kerja dan pendelegasian tugas, pola penerapan SPBE menjadi sporadis. Di sisi lain, kesadaran pentingnya berbagi layanan dan data penerapan SPBE masih rendah dengan masih adanya ego sektoral, hal ini menimbulkan dampak berantai, pentingnya komitmen dan semangat kolaborasi memastikan keterpaduan pemanfaatan potensi-potensi penerapan SPBE yang terbaik.

b) Tata Kelola dan Manajemen SPBE

Beberapa Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah memahami SPBE pada hilirnya, yaitu fokus pada layanan atau aplikasi. Hal tersebut berimbas pada implementasinya yang tidak komprehensif, sehingga penerapannya tidak sesuai dengan prinsip SPBE. Seperti proses bisnis yang belum terintegrasi, ditandai masih rendahnya budaya interoperabilitas layanan antar instansi pemerintah. Masih terbatasnya standar dan prosedur pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan Layanan SPBE, serta pengelolaan keamanan informasi belum optimal di hampir seluruh instansi pemerintah. Begitupula dengan penerapan Manajemen SPBE dan Audit TIK masih terdapat keterbatasan pedoman untuk melaksanakannya, hal ini berimplikasi terhadap penerapannya. Karena tidak direncanakan dan dikoordinasikan dengan baik, selaras dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

c) Anggaran dan Belanja TIK

Adanya ketimpangan anggaran pengelolaan TIK di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi faktor umum dalam penerapan SPBE, di mana penyebaran anggaran pengelolaan TIK terlihat masih belum seimbang. Hal ini muncul dari berbagai permasalahan, salah satunya adalah pemanfaatan anggaran pengelolaan TIK bukan pada unit kerja dan perangkat daerah yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya, sehingga penganggaran TIK menjadi tidak optimal dan terpadu, serta terjadi duplikasi pengadaan TIK karena tidak direncanakan dan dikoordinasikan dengan baik, selaras dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

d) Infrastruktur TIK

Kondisi infrastruktur TIK belum sepenuhnya melingkupi seluruh Instansi Pemerintah, khususnya pada daerah yang secara fisik belum terjangkau jaringan internet. Kondisi ini menjadi kendala dalam pemanfaatan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik, karena pemanfaatannya sebagian besar membutuhkan teknologi yang dapat diakses secara luas.

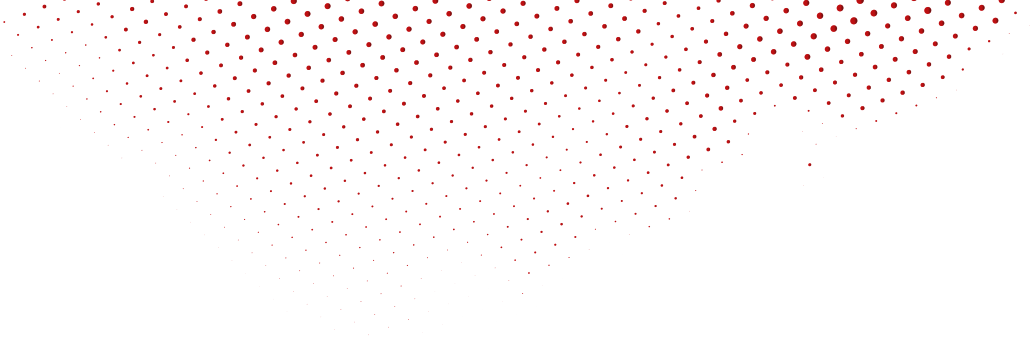
e) Sumber Daya Manusia SPBE.

Keterbatasan dari sisi kuantitas dan kualitas SDM SPBE masih dirasakan, khususnya di Pemerintah Daerah, di mana SDM masih kurang berperan sebagai pelaku dan pelaksana penerapan SPBE. Hal ini disebabkan terbatasnya latar belakang kompetensi yang memenuhi skala minimal kebutuhan bidang SPBE, selain itu karena pemenuhan kebutuhan dan penempatannya yang belum optimal (mismatch). Dengan tersedianya sumber daya yang memadai dalam arti kuantitas dan kualitas, maka tantangan di masa mendatang akan bisa diatasi dengan baik.



B. Saran dan Tindak Lanjut Tahun 2023

- a) Meningkatkan kesadaran dan komitmen Pimpinan untuk dapat memberikan arah kebijakan dan koordinasi penerapan SPBE terpadu yang dimanifestasikan dalam bentuk keinginan politis (political will) terkait pemerintahan yang baik.
- b) Mengupayakan penguatan kebijakan internal tata kelola SPBE sebagai pedoman dan koordinasi dalam penerapan SPBE, serta menerapkan aspek Manajemen SPBE untuk keberlangsungan tata kelola SPBE di IPPD.
- c) Mendorong penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana IPPD untuk keselarasan dan keterpaduan penerapan SPBE di lingkup Instansi dan Nasional.
- d) Meningkatkan kerjasama, kolaborasi dan keterpaduan dalam penerapan SPBE antar unit kerja/perangkat daerah dengan membentuk Tim Koordinasi SPBE.

- 
- e) Membangun koordinasi dan Program tahun 2023 akan dilakukan kolaborasi melalui forum antar evaluasi SPBE kepada IPPD oleh instansi, baik Instansi Pusat maupun Kementerian PANRB dalam rangka mengukur kembali optimalisasi penerapan SPBE secara menyeluruh. Prinsip keterpaduan yang menjadi dominan dalam evaluasi SPBE sesuai amanat PermenPANRB 59/2020, menjadi fokus pada masing-masing IPPD. Dalam pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023, diharapkan seluruh IPPD dapat menyampaikan hasil penilaian mandiri kepada Kementerian PANRB yang kemudian akan dilakukan penilaian eksternal melalui Penilaian Dokumen (desk evaluation), Penilaian Interview dan Penilaian Visitasi (jika diperlukan). Selain itu, Kementerian PANRB akan melakukan evaluasi SPBE terhadap 18 (delapan belas) Pemerintah Daerah yang belum dievaluasi pada tahun 2022. Hal ini ditujukan untuk dapat menghasilkan data baseline hasil evaluasi SPBE nasional secara menyeluruh.
- f) Mengoptimalkan penerapan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, serta berdaya guna dengan mendukung akselerasi pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai yang telah ditetapkan.
- g) Menumbuhkan kesadaran penerapan Manajemen SPBE secara menyeluruh agar terwujudnya penyelenggaraan SPBE yang optimum dan berkesinambungan.



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi